

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESAKABUPATEN PANGANDARAN

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINSOS PMD KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2021 - 20226



2021





PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Raya Parigi no. 180 Desa Karangbenda Tlp (0265) 2640972 Parigi 46393
Email : dinsospmd.pangandaran@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINSOSPMD KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR : 050/Kpts.016-DINSOSPMD/2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINSOSPMD KABUPATEN PANGANDARAN

TAHUN 2021 – 2026

DINSOSPMD KABUPATEN PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah, perlu diatur Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinsospmd Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026;
- b. bahwa berkenaan dengan RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 – 2026 maka perlu untuk merubah Indikator Kinerja Utama DINSOSPMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 – 2026 disesuaikan dengan RPJMD dimaksud;
- c. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018- 2023
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
16. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 56 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
17. Keputusan Kepala DINSOSPMD Kabupaten Pangandaran Nomor : 050/ /Kpts.-DINSOSPMD/2021 tentang Rencana Strategis DINSOSPMD Kabupaten Pangandaran.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	: INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINSOSPMD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2021 – 2026
KESATU	: Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinsospmd Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2026 sebagaimana dalam Lampiran keputusan ini.
KEDUA	: Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinsospmd Kabupaten Pangandaran, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun

laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinsospmd Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2026.

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Dinsospmd Kabupaten Pangandaran.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Parigi
Pada tanggal : 23 September 2021

**a.n Bupati Pangandaran
KEPALA DINSOSPMD
KABUPATEN PANGANDARAN**



H. WAWAN KUSTAMAN, S.Pd., MM.

Lampiran : Surat Keputusan Dinsospmd Kabupaten Pangandaran
Nomor : 050/Kpts. -DINSOSPMD/2021
Tanggal : 23 September 2021

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINSOSPMD KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2021 – 2026**

- 1 Nama Organisasi : Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 2 Visi Kabupaten : *Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia Yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa*
- 3 Misi : 1. Misi 1 : Meningkatkan Kehidupan Masyarakat yang Beriman Taqwa dan Mewujudkan Kerukunan Kehidupan Beragama
2. Misi 4 : Meningkatkan Ketahanan Ekonomi dan Sosial yang Berkeadilan Berbasis Potensi Lokal
3. Misi 5 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Melayani Efektif, Efisien dan Akuntabel

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN	
					FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		Indeks Desa Membangun	Indeks	$IDM = \frac{IKS + IKE + IKL}{3}$ <i>IDM = Indeks Desa Membangun IKS = Indeks Ketahanan Sosial IKE = Indeks Ketahanan Ekonomi IKL = Indeks Ketahanan Lingkungan</i>	Kemendes tentang status kemajuan dan kemandirian desa
		Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang berkualitas	Persentase peningkatan status desa maju dan mandiri	%	$\frac{\text{Jumlah desa maju dan mandiri}}{\text{Jumlah desa keseluruhan}} \times 100$	Kemendes tentang status kemajuan dan kemandirian desa
2	Meningkatnya cakupan penanganan PPKS		Presentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mandiri	%	$\frac{\text{PPKS yang mandiri}}{\text{PPKS keseluruhan}} \times 100$	DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN	
					FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
		Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Peningkatan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	$\frac{PPKS \text{ yang ditangani}}{PPKS \text{ keseluruhan}} \times 100$	DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)
3	Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Government)		Nilai SAKIP	Nilai	$\frac{Nilai \text{ Evaluasi Kinerja}}{Bobot \text{ Nilai Kinerja}} \times 100$	Inspektorat dan Bagian Organisasi Setda
		Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Baik	Nilai LHE AKIP Dinsos PMD	Nilai	$\frac{Nilai \text{ Evaluasi Kinerja}}{Bobot \text{ Nilai Kinerja}} \times 100$	DINSOSPMD dan Inspektorat

Ditetapkan di : Parigi
Pada tanggal : 23 September 2021

a.n Bupati Pangandaran
KEPALA DINSOSPMD
KABUPATEN PANGANDARAN



H. WAWAN KUSTAMAN, S.Pd., MM.



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS SOSIAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. Raya Parigi, No. 180 RT 03/RW 04, Dsn. Kemplung, Desa Karangbenda, Kec. Parigi, Kab. Pangandaran - 46393

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA**
KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR : 050/Kpts.006.e-DINSOSPMD/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINSOSPMD
KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2021-2026

KEPALA DINSOSPMD KABUPATEN PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 dan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan guna terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, perlu disusun dokumen Rencana Strategis DINSOSPMD Kabupaten Pangandaran TAHUN 2021-2026;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) DINSOSPMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala DINSOSPMD Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
13. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018- 2023
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15

Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
22. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 56 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
23. Surat Edaran Bupati Pangandaran Nomor 050/305-Bappeda.3/2021 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINSOSPMD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2021-2026
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) DINSOSPMD Kabupaten Pangandaran TAHUN 2021-2026.
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) sebagaimana Diktum KESATU *sebagaimana* tercantum dalam Lampiran I.
- KETIGA : Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) DINSOSPMD TAHUN 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
- KEEMPAT : Lampiran Keputusan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan KETIGA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan KEPALA DINSOSPMD ini dibebankan kepada DPA

DINSOSPMD Kabupaten Pangandaran dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

- KEENAM : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh pejabat yang berwenang.
- KETUJUH : Keputusan Kepala DINSOSPMD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Parigi
Pada tanggal : 23 Maret 2021

KEPALA DINSOSPMD
KABUPATEN PANGANDARAN



H. WAWAN KUSTAMAN, S.Pd., MM.
NIP. 19670722 199307 1 001

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINSOSPMD KAB. PANGANDARAN
NOMOR : 050/ Kpts.006.e-DINSOSPMD/2021
TANGGAL : 23 Maret 2020

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINSOSPMD KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2021-2026

- I. Penanggungjawab : Kepala DINSOSPMD
- II. Ketua : Sekretaris
- III. Sekretaris : Kasubag Program dan Keuangan
- IV. Anggota :
1. Kepala Bidang Sosial;
 2. Kepala Bidang Pekmas Lemadat;
 3. Kepala Bidang PKAPD;
 4. Kepala Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial;
 5. Kepala Seksi Penanganan dan Rehabilitasi Sosial;
 6. Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
 7. Kepala Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat;
 8. Kepala Seksi Penataan Desa;
 9. Seksi Kerjasama dan Administrasi Pemerintahan Desa;
 10. Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum;
 11. Bendahara Pengeluaran;
 12. Operator Perencanaan;
 13. Operator Keuangan;
 14. Operator Barang;

Ditetapkan di : Parigi
Pada tanggal : 23 Maret 2021

KEPALA DINSOSPMD
KABUPATEN PANGANDARAN



H. WAWAN KUSTAMAN, S.Pd., MM.

NIP. 19670722 199307 1 001

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA DINSOSPMD KAB. PANGANDARAN
NOMOR : 050/ Kpts.006.e-DINSOSPMD/2021
TANGGAL : 23 Maret 2021

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINSOSPMD KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2021-2026

a. **Penanggungjawab**, mempunyai tugas :

- 1) Mengkoordinasikan secara umum mengenai proses penyusunan dan penetapan Renstra;
- 2) Memberi arahan dan masukan dalam proses penyusunan dan penetapan;
- 3) Mempertanggungjawabkan secara umum terhadap pelaksanaan kegiatan berikut hasilnya.

b. **Ketua**, mempunyai tugas :

- 1) Mempelajari Tujuan dan Sasaran Kabupaten;
- 2) Mempelajari arah kebijakan Kabupaten;
- 3) Mempelajari isu – isu strategis Kabupaten;
- 4) Mempelajari Program Prioritas Kabupaten;
- 5) Mengkoordinasikan hal-hal teknis pelaksanaan kegiatan;
- 6) Mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data dan informasi;
- 7) Melaporkan hasil kegiatan kepada penanggungjawab.

c. **Sekretaris**, mempunyai tugas :

- 1) Menyelenggarakan administrasi kegiatan Rencana Strategis (RENSTRA) lingkup internal DINSOSPMD meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi;
- 2) Membantu Ketua dalam koordinasi penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA);
- 3) Membantu Ketua dalam membuat laporan Rencana Strategis (RENSTRA).

d. **Anggota**, mempunyai tugas :

- 1) Membantu Ketua dalam mempelajari arah kebijakan Kabupaten;
- 2) Membantu Ketua dalam mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data dan informasi;

- 3) Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan hal-hal teknis pelaksanaan kegiatan;
- 4) Menyusun bahan laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

Ditetapkan di : Parigi
Pada tanggal : 23 Maret 2021

KEPALA DINSOSPMD
KABUPATEN PANGANDARAN



H. WAWAN KUSTAMAN, S.Pd., MM.

NIP. 19670722 199307 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS SOSIAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. Raya Parigi, No. 180 RT 03/RW 04, Dsn. Kemplung, Desa Karangbenda, Kec. Parigi, Kab. Pangandaran - 46393

KEPUTUSAN DINSOSPMD KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR : 050/Kpts.015-DINSOSPMD/2021

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINSOSPMD KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2021-2026

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PANGANDARAN,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 – 2026, dan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan guna terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, perlu disusun dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

- (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4503);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
 14. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018- 2023
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
 20. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
 21. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 56 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINSOSPMD KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINSOSPMD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2021 - 2026.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis DINSOSPMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 – 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis DINSOSPMD Kabupaten Pangandaran sebagaimana Diktum KESATU yang selanjutnya disebut Renstra DINSOSPMD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Renstra DINSOSPMD Tahun 2021 - 2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) DINSOSPMD Tahun 2021-2026.
- KEEMPAT : Sistematika Penulisan Renstra DINSOSPMD Tahun 2021 – 2026 meliputi:
- a. BAB I : PENDAHULUAN
Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.
 - b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINSOSPMD KABUPATEN PANGANDARAN
Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DINSOSPMD, Sumber Daya DINSOSPMD, Kinerja Pelayanan DINSOSPMD, dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DINSOSPMD.

- c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINSOSPMD
Memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DINSOSPMD, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra DINSOSPMD Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan Penentuan Isu-Isu Strategis.
- d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
Memuat Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DINSOSPMD.
- e. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.
- f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
- g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
- h. BAB VIII : PENUTUP

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Parigi

Pada tanggal : 23 September 2021

**a.n Bupati Pangandaran
KEPALA DINSOSPMD
KABUPATEN PANGANDARAN**



H. WAWAN KUSTAMAN, S.Pd., MM

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga kami telah menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2021-2026.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Pangandaran Periode Tahun Anggaran 2021-2026 ini disusun berdasarkan hasil rumusan seluruh personil dan Stake Holder dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2021-2026. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Pangandaran berisikan rencana program dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan untuk Periode Tahun 2021-2026, dan akan menjadi pedoman bagi seluruh aparat Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Pangandaran dalam melaksanakan tugasnya untuk Periode Tahun 2021-2026.

Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam Perubahan Rencana Strategis ini, untuk itu kami sangat mengharapkan masukan-masukan positif dari semua pihak.

Akhirnya kami berharap semoga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Pangandaran Periode Tahun Anggaran 2021-2026 ini berdampak positif bagi kemajuan dan keberhasilan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Pangandaran.

Parigi, 23 September 2021

KEPALA
DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PANGANDARAN



H. WAWAN KUSTAMAN, S.Pd.,MM
NIP. 19670722 199307 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINSOS PMD KABUPATEN	
PANGANDARAN	8
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DINSOS PMD	8
2.2 Sumber Daya DINSOS PMD	21
2.3 Kinerja Pelayanan DINSOS PMD.....	23
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DINSOS PMD...	33
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.	31
3.1 Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
Pelayanan DINSODPMD	35
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil	
Kepala Pelayanan DINSODPMD.....	35
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi	36
44. Telaah Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup	
Strategis	37
3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis.....	37
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	41
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DINSOS PMD Kabupaten	
Pangandaran.....	41
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	43
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA	
PENDANAAN	48
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	67
BAB VIII PENUTUP	69

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 2.1	Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil Dinsospmd Berdasarkan Golongan.....	21
Tabel 2.2	Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil Dinsospmd Berdasarkan Jabatan Struktural	21
Tabel 2.3	Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil Dinsospmd Berdasarkan Pendidikan Formal.....	22
Tabel 2.4	Daftar Inventaris Barang Dinsospmd Kabupaten Pangandaran	22
Tabel T-C-23	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinsospmd Kabupaten Pangandaran.....	25
Tabel T-C-24	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DINSOSPMD Kabupaten Pangandaran	30
Tabel T-C 25	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DINSOS PMD Kabupaten Pangandaran.....	42
Tabel T-C 26	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	45
Tabel T-C 27	Rencana Progam, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran	49
Tabel T-C 28	Indikator Kinerja DINSOSPMD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Pangandaran terbentuk dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat hingga tahun ke empat ini telah menunjukkan eksistensinya sebagai Kabupaten termuda di Provinsi Jawa Barat.

Kabupaten Pangandaran memiliki luas wilayah 168.509 Km², Luas lautan 67.340 Ha, panjang pantai 91 Km, jumlah penduduk 403.987 Jiwa (140.797 KK), 10 Kecamatan, 93 Desa, 426 Dusun, 904 RW dan 3.117 RT. Dengan berbagai potensi kekayaan alam yang ada di laut dan darat serta berbagai potensi destinasi wisata baik destinasi wisata alam, buatan, dan budaya tentu saja merupakan wilayah yang sangat potensial untuk dikembangkan sehingga Visi dan Misi Kabupaten Pangandaran sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Pangandaran No 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

Dalam rangka menunjang keberhasilan pembangunan daerah, maka perlu dilaksanakan pembangunan di sektor sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa dengan berbagai macam kegiatan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga dapat didayagunakan secara optimal, efisien dan efektif.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dibentuk berdasarkan Perda Nomor 31 Tahun 2016 sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah, mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah meliputi Urusan Sosial dan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan.

Rencana Startegis (Renstra) Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran merupakan dokumen dan penyusunan progran kerja tahunan, penyusunan anggaran pembangunan dan belanja daerah selama kurun waktu 5 tahun kedepan 2021-2026.

Renstra adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun, sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD serta disesuaikan dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.

- Renstra DINSOSPMD disusun berpedoman pada RPJM Daerah sesuai Tugas dan Fungsi SKPD
- Renstra DINSOSPMD adalah dokumen perencanaan daerah berwawasan waktu 5 (lima) tahun
- Renstra DINSOSPMD adalah acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan SKPD

- Renstra DINSOSPMD adalah acuan dalam penilaian kinerja SKPD oleh lembaga auditor baik internal ataupun eksternal
- Renstra DINSOSPMD diwajibkan menerapkan dan mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan Kementrian/Lembaga

Proses penyusunan Renstra DINSOSPMD mengacu pada RPJMD Kabupaten Pangandaran dengan tugas dan fungsi SKPD serta berkoordinasi dengan Bappeda Kabupaten Pangandaran. Penyempurnaan Renstra DINSOSPMD meliputi, visi dan misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan.

Penyusunan Rencana Strategis SKPD sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pangandaran sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 – 2026.

Proses penyusunan Renstra DINSOSPMD mengacu terhadap SKPD Provinsi secara umum dan telah menetapkan tujuan yang akan dicapai yaitu Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, dengan mendorong pembangunan desa-desa mandiri dan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa.

Agar pembangunan terarah dan berkesimbangan maka perlu adanya perencanaan strategi yang dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan program kerja.

1.2 Landasan Hukum

Landasan penyusunan RENSTRA Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 -2025;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
7. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;

19. Peraturan Daerah kabupaten Pangandaran Nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2026;
20. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 28 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Rt/Rw) Kabupaten Pangandaran.
21. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 56 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Adapun Maksud penyusunan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut:

1. Memberikan arahan dalam perencanaan pemecahan masalah Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Pangandaran;
2. Menjabarkan program-program Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama 5 (lima) tahun (2021-2026) sesuai RPJMD Kabupaten Pangandaran;
3. Merupakan landasan kerangka penyusunan program kegiatan tahunan.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 – 2022 sebagai berikut::

- 1) Menyediakan bahan serta pedoman dalam melaksanakan kebijakan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran;
- 2) Sebagai pedoman dalam penetapan tujuan dan sasaran renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran tahunan dan 5 (lima) tahunan ;
- 3) Sebagai Instrument dalam mengukur efesiensi dan efektifitas kinerja.
- 4) Menjadikan Bahan Acuan Peningkatan Kinerja di Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran.
- 5) Memudahkan evaluasi kinerja dan pelayanan PD.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan secara ringkas pengertian Renstra PD, Fungsi Renstra PD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra PD, keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi, dan dengan Renja SKPD.

1.2. Landasan Hukum

Menjelaskan tentang Undang-undang peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra PD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam Penulisan Renstra PD, serta susunan garis besar isi Dokumen.

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Menggambarkan informasi tentang peran (tugas dan fungsi) PD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra PD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas PD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra PD.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur organisasi Perangkat Daerah

Menjelaskan secara umum tentang dasar hukum pembentukan PD, struktur organisasi PD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan eselon dibawah kepala PD. Uraian tentang struktur organisasi PD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana PD (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Menjelaskan secara ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki PD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Menjelaskan tingkat capaian kinerja PD berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan PD dan/atau indikator lainnya seperti MDGS atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Menjelaskan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan

macam pelayanan, perkiraan besarankebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD.

Menyajikan permasalahan-permasalahan pelayanan PD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Menjelaskan tugas dan fungsi PD yng terkait dengan visi, misi serta program Bupati dan wakil Bupati terpilih. Selanjutnya identifikasi permasalahan pelayanan PD, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD yang mempengaruhi percakapan visi dan misi tersebut. Faktor – Faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan PD.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi

Menjelaskan faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra PD Provinsi

3.4 Telaahan Rencana Tata ruang wilayah dan Kajian Lingkungan Stategis

Menjelaskan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Mereview faktor-faktor dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari gambaran pelayanan PD, Sasaran Jangka Menengah pada Renstra K/L, Sasaran Jangka Menengan dari Renstra PD Provinsi, implikasi RTRW bagi Pelayanan PD dan implikasi KLHS bagi Pelayanan PD.

Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasilnya, sehingga diperoleh informasi tentang isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra PD tahun rencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Berisi uraian rumusan pernyataan tujuan dan saran jangka menengah PD.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisi rumusan pernyataan dan kebijakan PD dalam lima tahun Mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisi uraian mengenai indikator kinerja PD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Menjelaskan Kaidah pelaksanaan kegiatan serta penegasan komitmen PD terhadap pelaksanaan Renstra RPJMD.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PANGANDARAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi DINSOSPMD

2.2.1 Tugas dan Fungsi

Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dibentuk berdasarkan Perda Nomor 31 Tahun 2016 sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah, mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah meliputi urusan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan, dengan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya,

Tugas dan Fungsi Unsur Organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(1) Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan meliputi urusan Bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Sosial, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat serta Penataan, Kerjasama dan Administrasi Pemerintahan Desa;

- b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Sosial, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat serta Penataan, Kerjasama dan Administrasi Pemerintahan Desa;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Sosial, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat serta Penataan, Kerjasama dan Administrasi Pemerintahan Desa;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Dalam melaksanakan Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Kepala Dinas membawahkan :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Sosial;
- c. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat;
- d. Bidang Penataan, Kerjasama dan Administrasi Pemerintahan Desa;

2. Sekretaris Dinas

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas pokok merumuskan, mengkoordinasikan rencana kerja, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan yang meliputi pelayanan umum dan kepegawaian, perencanaan, keuangan serta program pada Bidang dan Seksi.

(1) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
- b. pengumpulan dan pengolahan usulan rencana kebutuhan program dinas;
- c. penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
- d. penyelenggaraan, pengendalian, pelaksanaan kegiatan pelayanan umum dan kepegawaian, serta perencanaan dan keuangan;
- e. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi Bidang dan Seksi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja pada sekretariat, Bidang dan Seksi.

(2) Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa membawahi:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Program dan Keuangan.

2.1 Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, kepastakaan, kehumasan dan protokol, barang milik daerah/aset dan rumah tangga, penyiapan kebutuhan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai serta administrasi kepegawaian lainnya.

(1) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan pelaksanaan pelayanan Kepegawaian, Umum, kelembagaan serta ketatalaksanaan;
- b. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, barang milik daerah/aset, rumah tangga kedinasan dan administrasi kepegawaian;
- c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

2.2. Sub Bagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan data perencanaan evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan penyusunan program.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud , Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan rencana program, kegiatan dan anggaran Dinas;
- b. pelaksanaan teknis administrasi perencanaan program dan pengelolaan keuangan Dinas;
- c. pelaksanaan penyusunan laporan perencanaan program, kegiatan dan pengelolaan keuangan Dinas;

- d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Sub Bagian Program dan Keuangan.

3. Bidang Sosial

Bidang Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Bidang Sosial mempunyai tugas merumuskan bahan kebijakan operasional program Pembinaan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial, Penanganan Rehabilitasi Sosial dan Bantuan Perlindungan Sosial.

1. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Sosial mempunyai fungsi:
 - a. perumusan petunjuk teknis fasilitas pelaksanaan bidang Sosial;
 - b. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Sosial mempunyai uraian tugas :
 - a. Fasilitasi Pembinaan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial
 - b. Fasilitasi Penanganan Rehabilitasi Sosial dan Bantuan Perlindungan Sosial
 - c. Pengendalian, pengawasan, evaluasi pelaksanaan program Pembinaan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial, Penanganan Rehabilitasi Sosial dan Bantuan Perlindungan Sosial
 - d. Penyusunan rencana dan program serta bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Bidang Sosial
 - e. Pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dibidang tugasnya
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

3. Bidang sosial membawahkan :

1. Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial
2. Seksi Penanganan Rehabilitasi Sosial dan Bantuan Perlindungan Sosial
- I. Seksi Pembinaan Dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial
 1. Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sosial

2. Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan, perencanaan,

fasilitasi Pembinaan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial, yaitu :

- a. Balita terlantar
- b. Anak terlantar
- c. Anak jalanan
- d. Remaja putus sekolah
- e. Nilai-nilai Kepahlawanan, Keberintisan, Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial
- f. Keluarga rentan
- g. Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)
- h. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
- i. Karang Taruna
- j. TAGANA
- k. Pengumpulan Sumbangan Dana Sosial
- l. Undian
- m. Organisasi Sosial (Orsos)
- n. Penyuluhan
- o. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial
- p. Komunitas Adat Terpencil
- q. Korban tindak kekerasan
- r. Keluarga bermasalah sosial psikologis
- s. Pekerja migran

3. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Sosial, mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan, penganalisa data, perencanaan dan penyusunan program pembinaan dan pemberdayaan kesejahteraan sosial
- b. Pelaksanaan fasilitasi terhadap pembinaan dan pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial
- c. Pengendalian, pengawasan, evaluasi pelaksanaan program Pembinaan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial
- d. Penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

II. SEKSI PENANGANAN REHABILITASI SOSIAL DAN

BANTUAN PERLINDUNGAN SOSIAL

1. Seksi Penanganan Rehabilitasi Sosial dan Bantuan Perlindungan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sosial
2. Seksi Penanganan Rehabilitasi Sosial dan Bantuan Perlindungan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan, perencanaan, fasilitasi Penanganan dan Rehabilitasi Sosial, yaitu :
 - a. Penyandang Cacat
 - b. Anak Nakal / ABH
 - c. Korban NAPZA
 - d. Gelandangan dan Pengemis
 - e. Wanita Tuna Susila (WTS)
 - f. Korban HIV/AIDS
 - g. Bekas Penyakit Kronis
 - h. Bekas Narapidana
 - i. Fakir Miskin
 - j. Korban Bencana Alam
 - k. Korban Bencana Sosial
 - l. Keluarga Berumah Tidak Layak Huni
 - m. Lanjut Usia Terlantar
 - n. Orang Terlantar
 - o. Trafficking
3. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud seksi Penanganan Rehabilitasi Sosial dan Bantuan Perlindungan Sosial, mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan, penganalisa data, perencanaan dan penyusunan program Penanganan Rehabilitasi Sosial dan Bantuan Perlindungan Sosial
 - b. Pelaksanaan fasilitasi Penanganan Rehabilitasi Sosial dan Bantuan Perlindungan Sosial
 - c. Pengendalian, pengawasan evaluasi pelaksanaan penanganan rehabilitasi sosial dan bantuan perlindungan sosial
 - d. Penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya

- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

4. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat di Pimpin Oleh Kepala Bidang yang Berada di Bawah dan Bertanggung Jawab Kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merencanakan mengkoordinasikan mengevaluasi, melaporkan kegiatan Seksi Ekonomi Masyarakat, Seksi Lembaga Kemasyarakatan, Seksi Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana Dimaksud, Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Mempunyai Fungsi:

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat;
- b. penyelenggaraan rencana kerja Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat;
- c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan serta capaian kinerja Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

(2) Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana pada ayat (1), membawahkan :

- a. Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
- b. Seksi Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

(1) Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di Bawah dan Bertanggung Jawab Kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan, memberi tugas, mengkoordinasikan, mengevaluasi, memfasilitasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Pembuatan dan Penyusunan Program Kerja dibidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
- b. Pelaksanaan, Fasilitali, Sosialisasi, dan Pemberian Konsultasi Mekanisme Pemberdayaaan Ekonomi Masyarakat;
- c. Pelaksanaan Koordinasi Pengolahan Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
- d. Pengumpulan, Pencatatan dan Verifikasi Data Bekas Pengajuan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
- e. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
- f. Penyusunan Laporan Kegiatan dibidang Tugasnya;
- g. Pelaksanaan Tugas Lain Yang diberikan Pimpinan Sesuai Tugas dan Fungsinya

(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Seksi Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Masyarakat mempunyai uraian tugas :

- a. Menyelenggarakan, perencanaan, penyusunan program, petunjuk teknis, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
- b. Menyelenggarakan rancangan peraturan daerah yang berkaitan dengan Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
- c. Menyampaikan bahan dan menyelenggarakan rencana strategis dan rencana kerja Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
- d. Mengumpulkan bahan-bahan, menganalisa, dan menyusun bahan RPJPD, dan RKPD Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan RKPD Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
- e. Mengumpulkan bahan-bahan, menganalisa, dan menyusun bahan LPPD tahunan dan LPPD akhir masa jabatan Bupati;
- f. Menghimpun Rencana Kegiatan anggaran (RKA) dan dokumen pelaksanaan anggaran DPA Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
- g. Mengumpulkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati dan Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
- h. Mengelola, menganalisa laporan-laporan yang ada pada Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
- i. Menyelenggarakan kegiatan pembinaan, penyusunan program, perencanaan dan penataan, kerjasama dan administrasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

- j. Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan teknis penataan, kerjasama Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat,
- k. Menghimpun bahan-bahan petunjuk teknis dalam menyelenggarakan Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
- l. Menghimpun bahan-bahan perencanaan kegiatan dan laporan hasil kegiatan, mengolah dan menganalisa data, serta menyajikan data hasil Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat ;
- m. Mempertanggungjawabkan laporan-laporan kegiatan, keuangan, asset daerah secara berkala yang dikoordinasikan pada secretariat lingkup Dinas social Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- n. Melakukan pengamanan dan pemeliharaan asset daerah lingkup Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
- o. Mempelajari, memahami dan menyelenggarakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat,
- p. Membagitugas, mendelegasikan kewenangan, dan membina kepada bawahan serta menyelenggarakan program waskat agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- q. Menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan pengembangan karier ;
- r. Melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan kepala dinas sebagai kuasa pengguna anggaran lingkup Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- s. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan / atau kegiatan kepada atasan;
- t. Memberikan saran dan pertimbangan teknis Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat,
- u. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

5. Bidang Penataan, Kerjasama dan Administrasi Pemerintahan Desa

Bidang Penataan, Kerjasama dan Administrasi Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi, melaporkan kegiatan Seksi Penataan Desa, dan Seksi Kerjasama dan Administrasi Pemerintahan Desa.

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Penataan, Kerjasama dan Administrasi Pemerintahan Desa, mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan dan penyusunan program operasional Seksi Penataan Desa, dan Seksi Kerjasama dan Administrasi Pemerintahan Desa;
- b. Penyelenggaraan fasilitasi Bidang Penataan, Kerjasama dan Administrasi Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten;
- c. Pengendalian pelaksanaan Bidang penataan, kerjasama dan Administrasi Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten;
- d. Pengkoordinasian antar bidang dan Seksi pada lainnya dan sekretariat lingkup Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Dalam melaksanakan Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penataan, Kerjasama dan Administrasi Pemerintahan Desa membawahkan:

- a. Seksi Penataan Desa;
- b. Seksi Kerjasama dan Administrasi Pemerintahan Desa.

(1) Seksi Penataan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengkoordinasikan, mengevaluasi, memfasilitasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Penataan Desa.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penataan Desa mempunyai fungsi:

- a. perencanaan kegiatan Seksi Penataan Desa;
- b. melaksanakan kegiatan Urusan Seksi Penataan Desa;
- c. pelaksanaan dan pengendalian seksi Penataan Desa;
- d. pembagian pelaksanaantugas Seksi Penataan Desa; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(1) Seksi Kerjasama dan Administrasi Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengkoordinasikan, mengevaluasi, dan mengendalikan kegiatan Seksi Kerjasama dan Administrasi Pemerintahan Desa.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kerjasama dan Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai fungsi:

- a. perencanaan kegiatan seksi Kerjasama dan Administrasi Pemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan kegiatan urusan Seksi Kerjasama dan Administrasi Pemerintahan Desa;
- c. Pelaksanaan dan pengendalian Seksi Kerjasama dan Administrasi Pemerintahan Desa;
- d. Pembagian pelaksanaan tugas Seksi Kerjasama dan Administrasi Pemerintahan Desa;
- e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Kelompok dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis kebutuhan dan beban kerja.

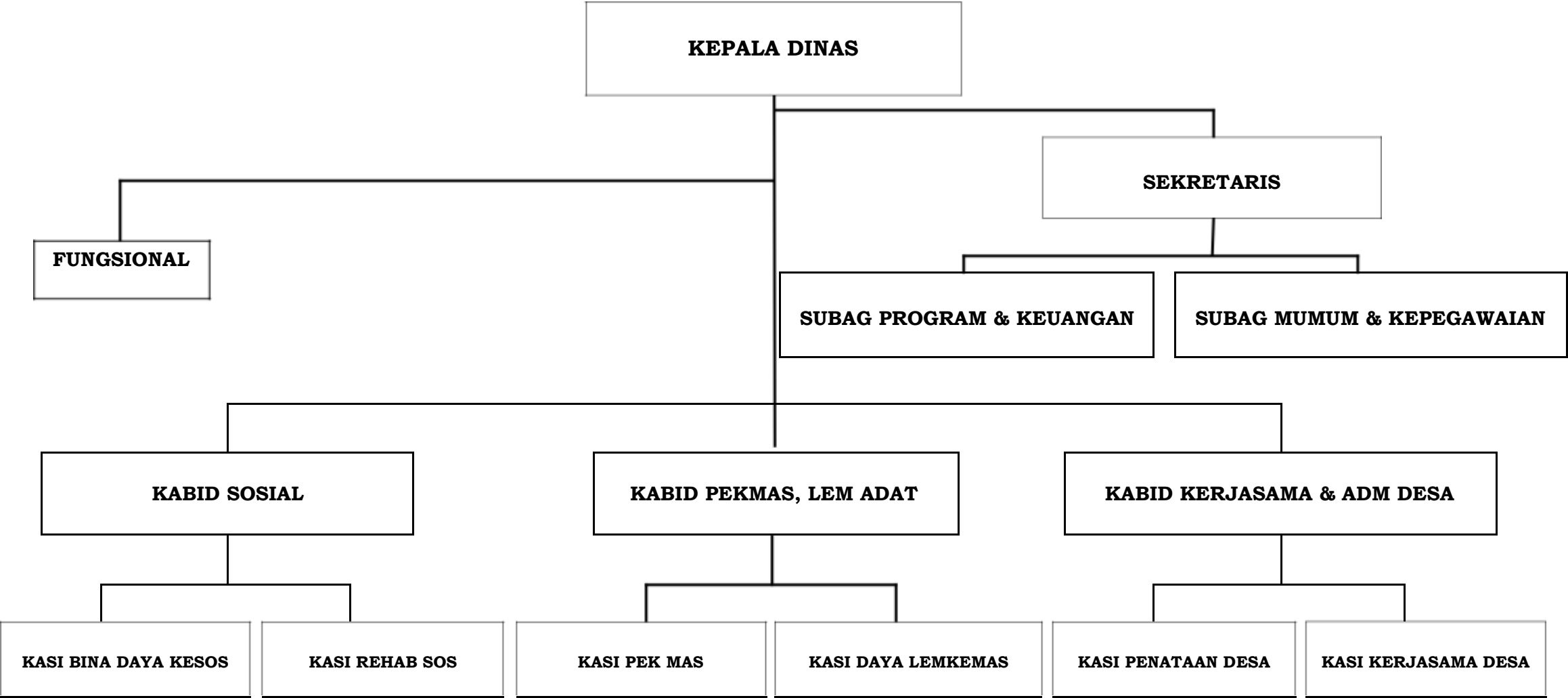
2.1.2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka susunan organisasi DINSOSPMD Kabupaten Pangandaran pada tahun 2016 sebagai berikut :

- I. Kepala Dinas
- II. Sekretariat
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan
- III. Bidang Sosial

1. Kepala Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial
 2. Kepala Seksi Penanganan dan Rehabilitasi Sosial
- IV. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
1. Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
 2. Kepala Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
- V. Bidang Penataan, Kerjasama dan Administrasi Pemerintah Desa
1. Kepala Seksi Penataan Desa
 2. Kepala Seksi Kerjasama dan Administrasi Pemerintah Desa
- VI. Kelompok Jabatan Fungsional

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PANGANDARAN



2.2. Sumber Daya DINSOSPMD Kabupaten Pangandaran.

2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran didukung oleh sumber daya manusia aparatur sebagai berikut:

TABEL 2.1
DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL DINSOSPMD
BERDASARKAN GOLONGAN

No	Golongan	Jumlah		Jumlah	Keterangan
		Perempuan	Laki-Laki		
1	IV	1	4	5	
2	III	2	5	7	
3	II	0	2	2	
Jumlah		3	11	14	

TABEL 2.2
DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL DINSOSPMD
BERDASARKAN JABATAN STRUKTURAL

No	Eselon	Jumlah		Jumlah	Keterangan
		Perempuan	Laki-Laki		
1	I	-	-		
2	II		1	1	
3	III	1	3	4	
4	IV	1	4	5	
Jumlah		2	8	10	

TABEL 2.3
DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL DINSOSPMD
BERDASARKAN PENDIDIKAN FORMAL

No	Pendidikan	Jumlah		Jumlah	Keterangan
		Perempuan	Laki-Laki		
1	S3	-	-	-	
2	S2	1	4	5	
3	S1	1	5	6	
4	DIII	-	-	-	
5	SLTA	1	2	3	
Jumlah		3	11	14	

2.2.2 Aset DINSOSPMD (Sarana dan prasarana Penunjuang)

Data Aset DINSOS PMD Kabupaten Pangandaran sampai dengan Februari 2017 adalah sebagai berikut :

TABEL 2.4 DAFTAR INVENTARIS BARANG DINSOSPMD KABUPATEN PANGANDARAN				
No	Nama Barang/Jenis Barang	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Sepeda Motor	76	Unit	
2	Meja Kerja	18	Buah	
3	Kursi Kerja	10	Buah	
4	Laptop	29	Unit	
5	Komputer Pc	7	Unit	
6	Printer	18	Unit	
7	Penghancur Kertas	2	Unit	
8	Brangkas	1	Unit	
9	Lemari Arsip	4	Buah	
10	Lemari Kayu	3	Buah	
11	Lemari Es	1	Unit	
12	Kipas Angin	4	Unit	
13	Projektor+Attachment	3	Unit	
14	Mesin Pompa Air	1	Unit	
15	TV LED	1	Unit	
16	Ac Unit	5	Unit	
17	Genset	2	Unit	
18	Handy Talky	11	Unit	
19	Mobil	6	Unit	

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.3.1 Bidang Sosial

Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial pada hakekatnya adalah Pembangunan Manusia seutuhnya yang fokus sasarannya diarahkan kepada Pembangunan Sumber Daya Manusia di Bidang Kesejahteraan Sosial serta penciptaan lingkungan sosial masyarakat yang sehat dan dinamis.

Sasaran Pelayanan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial adalah Individu, Keluarga, Kelompok atau Komunitas Masyarakat yang mengalami nasib kurang beruntung atau mengalami hambatan baik fisik maupun sosialnya yang disebut sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), serta masyarakat yang mampu melaksanakan upaya penanganan masalah Kesejahteraan Sosial yaitu mereka yang termasuk dalam Kelompok Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

2.1.2. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

Kinerja Pelayanan Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat sebagai berikut :

1. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Promosi, Gelar Teknologi Tepat Guna melalui 2 hasil inovasi TTG
2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Pembangunan infrastruktur prasarana pedesaan melalui Pendampingan BSMSS dan Pendampingan TMMD.
3. Pembentukan dan Pemberdayaan Lembaga Adat sebanyak 20 lembaga adat selama 5 tahun.
4. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan sebanyak 93 Desa.
5. Pelatihan Perempuan di Pedesaan Dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif sebanyak 9 UPK.
6. Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebanyak 27 BUMDES
7. Revitalisasi Posyandu sebanyak 93 Desa

2.1.3. Bidang Penataan, Kerjasama dan Adminitrasi Pemerintahan Desa.

Kinerja Pelayanan Bidang Penataan, Kerjasama dan Adminitrasi Pemerintahan Desa sebagai berikut :

1. Peningkatan Kinerja Lembaga dan organisasi masyarakat Desa melauai 3 lembaga/organisi kemasyarakatan Desa.

2. Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan melalui 3 lembaga/organisasi kemasyarakatan Desa.
3. Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa
4. Pemberian stimulan pembangunan desa dengan Fasilitas Administrasi Pembangunan Desa.
5. Monitoring dan Evaluasi Administrasi Pembangunan Desa.
6. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan dalam hal penataan Tanah Kas Desa.
7. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa dalam hal Tertib Administrasi pengelolaan keuangan Desa.
8. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa dalam hal Tertib Administrasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa.
9. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa dalam hal Tertib Administrasi Umum dan Administrasi Lainnya.
10. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tertib Administrasi Umum dan Administrasi Lainnya.
11. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes).
12. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Berikut Pencapaian Kinerja Pelayanan DINSOSPMD dijabarkan dalam bentuk Tabel T-C. 23.

Tabel T-C 23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinsospmd
Kabupaten Pangandaran

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SNPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renja DINSOSPMD Tahun-				Realisasi Capaian				Rasio Capaian Pada Tahun			
					2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Persentase Jumlah Keluarga Miskin yang diberi bantuan		3%		0,1 %	0,1%	0%	0%	0,1 %	0,1%	0%	0%	100 %	100 %	0%	0%
2	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial		2,5%		0,1 %	0,1%	0,1%	0,1%	0,1 %	0,1%	0,1%	0,1%	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Persentase anak terlantar yang dibina		100%		10%	30%	0%	0%	10%	30%	0%	0%	100 %	100 %	0%	0%
4	Persentase Penyandang Cacat dan Trauma yang terbina		6.3%		1,2 %	1,2%	0	0	1,2 %	1,2%	0	0	100 %	100 %	0%	0%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SNPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renja DINSOSPMD Tahun-				Realisasi Capaian				Rasio Capaian Pada Tahun			
					2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	Persentase penyandang penyakit sosial yang ditangani		100%		10%	30%	0%	0%	10%	30%	25%	25%	100 %	100 %	100 %	100 %
6	Persentase lembaga kesejahteraan keluarga Sosial (LKS) yang terbina		70%		45%	50%	50%	0%	45%	50%	50%	0%	100 %	100 %	100 %	0%
7	Persentase Jumlah Keluarga Miskin yang dibina				0%	0%	0,1%	0,1%	0%	0%	0,1%	0,1%	0%	0%	100 %	100 %
8	Persentase Jumlah Taman Makam yang Dikelola				0%	0%	50%	50%	0%	0%	50%	50%	0%	0%	100 %	100 %
9	Persentase Posyandu Aktif		100%		70%	80%	90%	100%	70%	80%	90%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SNPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renja DINSOSPMD Tahun-				Realisasi Capaian				Rasio Capaian Pada Tahun			
					2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	Persentase Masyarakat Perdesaan yang dibina		100%		20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	100%	100%	100%	100%
11	Persentase Kelompok Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang memperoleh pembinaan		100%		20%	20%	0%	0%	20%	20%	0%	0%	100%	100%	0%	0%
12	Persentase Desa yang mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)		100%		15%	20%	15%	15%	15%	20%	15%	15%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SNPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renja DINSOSPMD Tahun-				Realisasi Capaian				Rasio Capaian Pada Tahun			
					2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	Persentase aparaturn pemerintah desa yang dapat memahami penyelengaraan pemerintahan desa		100%		10%	15%	25%	25%	10%	15%	25%	25%	100 %	100 %	100 %	100 %
14	Persentase Desa yang memiliki Administrasi Desa dan Pengelolaan Aset Desa yang baik		100%		10%	15%	25%	25%	10%	15%	25%	25%	100 %	100 %	100 %	100 %
15	rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti					49 Orang	10 Oran g	350 Orang		49 Orang	10 Oran g	344 Orang		100%	100 %	98,3 %
16	rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti					15 Anak	32 Anak	30 Anak		32 Anak	32 Anak	30 Anak		213%	100 %	100%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SNPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renja DINSOSPMD Tahun-				Realisasi Capaian				Rasio Capaian Pada Tahun			
					2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17	rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti					100 Orang	70 Orang	2481 Orang		100 Orang	100 Orang	2481 Orang		100%	142 %	100%
18	rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti					-	20 Orang				18 Orang			-	90%	
19	perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota					351 Orang	189 Orang	118.816 Orang		351 Orang	189 Orang	116.458 Orang		100%	100%	98%

Tabel T-C. 24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DINSOSPMD
Kabupaten Pangandaran

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan					
													Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3	
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14	15	17	18	17	18	17	18
Program pelayanan administrasi perkantoran	471,400,000	534,411,500	404,625,000	417,203,082	370,967,270	460,662,860	379,799,832	334,699,026	79%	86%	94%	80%	534,411,499	460,662,859	404,624,999	379,799,831	417,203,081	334,699,025
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	201,900,000	246,200,000	230,000,000	202,339,000	189,630,657	200,637,495	217,311,987	197,070,569	94%	81%	94%	97%	246,199,999	200,637,494	229,999,999	217,311,986	202,338,999	197,070,568
Program peningkatan disiplin aparatur	12,000,000	-	-	-	8,540,000	-	-	-	71%	-	-	-	(1)	(1)	-	-	-	-
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	83,450,000	86,155,000	63,000,000	95,008,000	55,070,000	72,555,000	63,000,000	95,008,000	66%	84%	100%	100%	86,154,999	72,554,999	62,999,999	62,999,999	95,007,999	95,007,999
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	372,781,000	584,166,300	594,627,500	2,007,798,450	346,895,800	513,318,000	530,387,579	1,688,794,966	93%	88%	89%	84%	584,166,299	513,317,999	594,627,499	530,387,578	2,007,798,449	1,688,794,965
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	565,550,000	679,500,000	836,075,000	17,029,956,000	484,511,225	754,642,600	816,443,830	16,077,885,140	86%	111%	98%	94%	679,499,999	754,642,599	836,074,999	816,443,829	17,029,955,999	16,077,885,139
Program pembinaan para penyandang cacat dan	17,978,000	-	-	-	11,023,000	-	-	-	61%	-	-	-	(1)	(1)	-	-	-	-

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan					
													Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3	
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14	15	17	18	17	18	17	18
trauma																		
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	17,978,000	-	50,000,000	-	17,978,000	-	46,339,000	-	100%	-	93%	-	(1)	(1)	-	-	(1)	(1)
Program Pengelolaan Area Pemakaman		-	80,000,000	45,000,000			79,652,000	39,677,500	-	-	100%	88%	-	-	-	-	44,999,999	39,677,499
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	5,734,250,000	6,816,875,000	8,226,520,000	8,754,153,300	5,644,969,200	6,778,286,000	8,127,363,260	6,091,227,000	98%	99%	99%	70%	6,816,874,999	6,778,285,999	8,226,519,999	8,127,363,259	8,754,153,299	6,091,226,999
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	216,495,000	1,116,144,000	1,649,830,000	836,655,550	195,260,692	1,024,638,689	1,600,833,639	642,255,300	90%	92%	97%	77%	1,116,143,999	1,024,638,688	1,649,829,999	1,600,833,638	836,655,549	642,255,299
Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan		35,000,000	-	-		31,320,000	-	-	-	89%	-	-	-	-	(1)	(1)	-	-
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	32,360,000	50,000,000	20,000,000	1,158,000	27,864,700	46,336,428	17,661,923	1,158,000	86%	93%	88%	100%	49,999,999	46,336,427	19,999,999	17,661,922	1,157,999	1,157,999
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	174,917,000	230,719,500	358,632,500	549,868,000	165,974,764	228,486,090	289,142,413	542,094,050	95%	99%	81%	99%	230,719,499	228,486,089	358,632,499	289,142,412	549,867,999	542,094,049
Program Penataan Administrasi Desa dan Pengelolaan Aset Desa		-	20,300,000	67,203,000			17,400,000	47,434,650	-	-	86%	71%	-	-	-	-	67,202,999	47,434,649

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan					
													Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3	
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14	15	17	18	17	18	17	18
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	214,072,000.00	-	-	-	182,899,697	-	-	-	85%	-	-	-	(1)	(1)	-	-	-	-

4. Tantangan dan Peluang Pengembangan DINSOSPMD

Ruang Lingkup Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Pangandaran mencakup Visi dan Misi Dinas, Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal yang menggambarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan penyelenggaraan organisasi Dinas, penentuan faktor-faktor kunci keberhasilan, Tujuan dan Sasaran serta Strategi dan Tolok Ukur Evaluasi Kinerja. Sedangkan ruang lingkup substansi dari Kebijakan dan Program Pembangunan didasarkan pada Asas Desentralisasi serta hal lain yang dipandang penting dan strategis, yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Pangandaran sebagai suatu organisasi, memahami kondisi organisasi sehingga dapat menyusun Strategi dan Kebijakan yang tepat. Untuk hal tersebut diperlukan analisis SWOT untuk menelaah Faktor Internal dan Faktor Eksternal, sebagai unsur kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.

2.2.1. Kondisi Internal

Analisis Lingkungan Internal pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Pangandaran mencakup 3 (tiga) unsur utama dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi, yakni (1) Sumber Daya Aparatur/SDM, (2) Sarana dan Prasarana, (3) Sumber Daya dan Pengelolaan Keuangan. Rincian kekuatan dan kelemahan yang merupakan Lingkungan Internal organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dalam pengembangan pelayanan adalah :

2.2.1.1. Kekuatan (*Strength*)

NO.	KEKUATAN
1	Tersedianya Anggaran APBD Kabupaten yang didukung APBD Provinsi dan APBN
2	Tersedianya Tenaga Relawan dalam Mengatasi Permasalahan Sosial
3	Tersedianya SOTK Dinas
4	Adanya Kebijakan Daerah yang Mendukung Pembangunan Masyarakat Desa
5	Tersedianya Aparatur Pemerintahan Desa
6	Adanya Sarana dan Tenaga Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
7	Tersedianya Data Mikro sebagai Data Operasional Pelaksanaan Program/Kegiatan

NO.	KELEMAHAN
1	Kuantitas dan Kompetensi Aparatur Masih Memerlukan Penyesuaian
2	Kualitas Sumber Daya Manusia Belum Memadai
3	Mekanisme Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Belum Maksimal
4	Dukungan Sarana dan Prasarana Belum Maksimal
5	Belum Tersedianya Data Base yang Valid atau Terpusat

2.2.2. **Kondisi Eksternal**

Perkembangan Globalisasi yang ditandai oleh era perdagangan bebas dan diberlakukanya Masyarakat ekonomi asean (MEA) Serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cukup pesat telah mendorong peningkatan persaingan antar wilayah yang membutuhkan adanya Sumber Daya Manusia yang memadai.

NO.	PELUANG
1	Tersedianya Lembaga-lembaga Sosial dan Kemasyarakatan sebagai Mitra Kegiatan
2	Tingginya Partisipasi Masyarakat
3	Terbentuknya Kelembagaan Wahana Pembelajaran Ketahanan Keluarga dan Ekonomi Keluarga di Perdesaan
4	Adanya IMP yang masih tetap Konsen terhadap Program/Kegiatan di Tingkat RT
5	Dukungan dari Pemerintah Daerah terhadap Program/Kegiatan
6	Adanya Undang-undang dan Peraturan sebagai Dasar Pelaksanaan Program/Kegiatan Organisasi

NO.	ANCAMAN
1	Semakin Beragam dan Meningkatnya Permasalahan Sosial sebagai Dampak Perkembangan Industrial
2	Terjadinya Bencana Alam dan Bencana Sosial Berdampak pada Terjadinya Disparitas Sosial Ekonomi Masyarakat
3	Belum Berjalannya Pola Kemitraan Secara Optimal
4	Rendahnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan
5	Rendahnya Pembinaan terhadap Kelompok Usaha Masyarakat

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINSOSPMD

a. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Adapun permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut :

1. SDM Aparatur masih sangat terbatas baik kuantitas maupun kualitas.
2. Sarana dan prasanara perkantoran belum memadai.
3. Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
4. Penyediaan sarana dan prasarana sosial.
5. Penanggulangan korban bencana pada tahap tanggap darurat.
6. Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu.
7. Kualitas Perencanaan Pembangunan Desa masih belum optimal.
8. SDM Pengelolaan sistem keuangan desa perlu ditingkatkan.
9. Kapasitas masyarakat, permodalan, dukungan sarana dan prasarana ekonomi, serta pendampingan kepada rumah tangga kurang mampu dan miskin.
10. Peningkatan KapasitasPendampingan Aparatur Pemerintah dan Kelembagaan.
11. Ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah sangat tinggi.
12. Badan Usaha milik Desa (BUMDes) blm berkembang.
13. Koordinasi dan konsolidasi inter dan antar pemangku kepentingan.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih.

Penyusunan Rencana Strategis SKPD sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pangandaran sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalamRenstra Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 – 2026.

Visi Kabupaten Pangandaran :

”Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa”

MISI :

1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang beriman taqwa dan mewujudkan kerukunan kehidupan beragama.
2. Mengembangkan wisata dengan memperluas akses dan penataan berkelanjutan
3. Mengembangkan aksesibilitas kesehatan dan pendidikan sampai perguruan tinggi dan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan serta peningkatan kompetensi lulusan
4. Meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial yang berkeadilan berbasis potensi lokal
5. Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel

6. Peningkatan pembangunan infrastruktur, penataan ruang, dan mitigasi bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan

Berdasarkan telaahan terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Pangandaran yang terkait dengan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran yaitu misi 1 Mewujudkan kehidupan masyarakat yang beriman taqwa dan mewujudkan kerukunan kehidupan beragama, misi 4 Meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial yang berkeadilan berbasis potensi lokal dan misi 5 Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel

Dalam menunjang misi ke satu dan misi ke lima Kepala Daerah Kabupaten Pangandaran, Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa didukung oleh tiga sasaran yaitu ;

1. Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Baik
2. Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
3. Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang berkualitas

Sasaran tersebut Menjadikan masyarakat Pangandaran lebih sejahtera dengan penangan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial melalui pelaksanaan program dan kegiatan di Bidang Sosial, sedangkan untuk penangan permasalahan desa dan penguatan lembaga ekonomi desa di Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, dan Bidang Penataan, Kerjasama dan Adminitrasi Pemerintah Desa. Dengan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat desa dengan bantuan dan dukungan OPD, menjadikan masyarakat yang mandiri, maju dan sejahteran. Hal ini bisa menjadikan Pangandaran mempunyai masyarakat berkualitas yang bisa dikenal oleh masyarakat luar daerah maupun dunia. Hal ini sejalan dengan Visi ini berkaitan dengan visi Kabupaten Pangandaran yaitu Kabupaten Pangandaran Sebagai Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia yang Berpijar Pada Nilai Karakter Bangsa.

3.3 Telaahan Renstra Pusat dan Renstra PD Provinsi

3.3.1 Renstra PD Provinsi

PD Provinsi secara umum telah menetapkan tujuan yang akan dicapai yaitu Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, dengan mendorong pembangunan desa-desa mandiri dan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Arah kebijakan PD Provinsi yang akan dicapai dengan strategi sebagai berikut: Memperkuat desa dan masyarakat desa serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di perdesaan untuk mendorong keterkaitan desa-kota dan perdesaan berkelanjutan, melalui :

1. Mengentaskan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ke dalam Kehidupan yang layak dan normatif
2. Meningkatkan Kepedulian masyarakat terhadap permasalahan sosial
3. Mewujudkan pelayanan kebutuhan dasar korban bencana sesuai dengan kebutuhan dasar minimal
4. Berperan dalam pengentasan kemiskinan
5. Mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dengan strategi mengupayakan pencapaian Standar Pelayanan Minimal
6. Pengembangan Sumber Daya Manusia

7. Penguatan Kelembagaan Masyarakat dan Pemerintah Desa
8. Memanfaatkan Sumber Daya Alam Teknologi Tepat Guna
9. Menciptakan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat
10. Meningkatkan keterpaduan dalam pemberdayaan yang dilakukan instansi sektoral

Apabila dilihat dari uraian Renstra PD Provinsi tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari beberapa point tersebut diatas adalah sangat relevan dengan tujuan yang ingin dicapai dalam Renstra kabupaten Pangandaran.

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

RT RW Kabupaten menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, pembangunan di setiap sektor, pengarahan lokasi investasi yang dilaksanakan Pemerintah Kota dan/atau masyarakat, pengawasan terhadap perizinan lokasi pembangunan, penyusunan kegiatan perencanaan dibawahnya atau turunannya, penyusunan rencana penanggulangan bencana, dan penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berikut Penghambat dan pendorong Pelayanan Dinsospmd yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinsospmd Tahun ditinjau dari Implementasi RTRW dan KLHS :

Permasalahan	Penghambat	Pendorong	Ket
Tidak Adanya Rumah Singgah	Tidak Ada Lahan	Harus diadakan Relokasi Khusus rumah Singgah	RT RW
Masih banyak Keluarga Miskin yang belum memiliki jaminan Sosial	Validasi Data yang Belum Menyeluruh	Dukungan Anggaran Untuk Tim Validasi Data	KLHS

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Penentuan isu-isu stategis didasarkan terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarkat dan Desa Kabupaten Pangandaran dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi , maka isu –isu stategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan (2016-2021) untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Kondisi Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran pada tahun-tahun terakhir ini, yang menjadi isu utama antara lain

1. Perlunya peningkatan sistem perlindungan sosial
2. Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
3. Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
4. Penyediaan sarana dan prasarana sosial.
5. Penanggulangan korban bencana pada tahap tanggap darurat.
6. Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu.
7. Kualitas perencanaan Pembangunan Desa masih blm optimal.

8. Penerapan sistem Pengelolaan keuangan desa belum optimal.
9. Peningkatan peran Kecamatan dalam pengelolaan pembangunan desa.
10. Kapasitas masyarakat, permodalan, dukungan sarana dan prasarana ekonomi, serta pendampingan kepada rumah tangga kurang mampu dan miskin.
11. Peran pendamping Dana Desa, PKH, Tagana, TKSK, Karangtaruna blm optimal.
12. Fasilitasi terhadap pera pendamping belum memadai.
13. Pendampingan, pemberdayaan masyarakat desa dan kelembagaan masyarakat desa dan PMKS.
14. Pengembangan kapasitas dan pendampingan aparatur pemerintah dan kelembagaan.
15. Penguatan dan pengembangan kapasitas produksi, dan pemasaran dalam mendukung peningkatan pembangunan ekonomi pedesaan melalui pengebangan teknologi tepat guna.
16. Kualitas perencanaan pembangunan Desa.
17. Data profil desa, potensi desa serta kemiskinan yang blm tepat/tidak sama.
18. Ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah sangat tinggi.
19. Layanan pemerintah desa kepada masyarakat belum optimal.
20. Badan Usaha milik Desa (BUMDes) blm berkembang.
21. Aksesibilitas jalan menuju lokasi produksi pertanian belum memadai
22. Koordinasi dan konsolidasi inter dan antar pemangku kepentingan.
23. Penganggaran masih terbatas.
24. SDM Aparatur masih sangat terbatas baik kuantitas maupun kualitas.
25. Sarana dan prasanara perkantoran belum memadai.

Startegi berdasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal sebagai berikut :

3.5.1. Strategi Kekuatan (Strength) Peluang (Opportunity)

1. Manfaatkan anggaran APBD Kabupaten yang di dukung APBD Provinsi dan APBN terhadap program/ kegiatan
2. Manfaatkan tenaga relawan dalam mengatasi permasalahan sosial dalam membentuk lembaga sosial dan kemasyarakatan sebagai mitra kegiatan.
3. Manfaatkan SOTK Dinas untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.
4. Manfaatkan SOTK Dinas untuk membentuk kelembagaan wahana pembelajaran ketahanan keluarga dan ekonomi keluarga dipedesaan.
5. Manfaatkan SOTK Dinas untuk meningkatkan Institusi Masyarakat Pedesaan yang masih tetap konsen terhadap program/kegiatan di tingkat RT.
6. Gunakan SOTK Dinas mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah terhadap program/ kegiatan .
7. Manfaatkan SOTK Dinas untuk didukung UU dan Peraturan sebagai dasar pelaksanaan program/ kegiatan organisasi.
8. Gunakan kebijakan daerah yang mendukung pembangunan masyarakat desa dalam upaya memanfaatkan partisipasi masyarakat.
9. Manfaatkan kebijakan daerah yang mendukung pembangunan masyarakat desa untuk membentuk kelembagaan sbg wahana pembelajarn ketahanan keluarga dan ekonomi keluarga di perdesaan.
10. Manfaatkan kebijakan daerah yang mendukung pembangunan masyarakat desayang masih tetap konsen terhadap program/kegiatan di Tingkat RT.
11. Manfaatkan kebijakan daerah yang mendukung pembangunan masyarakat desauntuk mendapatkan dukungan dari Pemerintah Daerah terhadap Program dan Kegiatan

12. Manfaatkan kebijakan daerah yang mendukung pembangunan masyarakat desayang didasari oleh UU dan peraturan sebagai dasar
13. pelaksanaan program/kegiatan organisasi.

3.5.2. Strategi Kelemahan (Weakness) Peluang (Opportunity)

1. Tingkatkan kualitas dan kompetensi aparatur untuk mendukung lembaga sosial dan kemasyarakatan sebagai Mitra Kegiatan
2. Tingkatkan kualitas dan kompetensi aparatur untuk mendukung partisipasi masyarakat.
4. Tingkatkan kualitas dan kompetensi aparatur agar dapat membentuk kelembagaan wahana pembelajaran ketahanan keluarga dan ekonomi keluarga di perdesaan.
5. Tingkatkan kualitas dan kompetensi aparatur untuk menggerakkan Institusi Masyarakat Pedesaan yang masih tetap konsen terhadap program/kegiatan di tingkat RT.
6. Tingkatkan kualitas dan kompetensi aparatur dengan adanya dukungan dari Pemda terhadap program/kegiatan.
7. Tingkatkan kualitas dan kompetensi aparatur dengan adanya UU dan Peraturan sebagai dasar pelaksanaan program/ kegiatan organisasi.
8. Tingkatkan kualitas SDM dengan memanfaatkan partisipasi masyarakat yang tinggi.
9. Tingkatkan kualitas SDM agar dapat membentuk kelembagaan sebagai wahana pembelajaran ketahanan keluarga dan ekonomi keluarga di perdesaan.
10. Tingkatkan kualitas SDM agar dapat menggerakkan IMP yang masih tetap konsen terhadap program/kegiatan di Tingkat RT.
11. Tingkatkan kualitas SDM untuk mendapatkan dukungan dari Pemerintah Daerah terhadap Program dan Kegiatan
12. Tingkatkan kualitas SDM dengan memanfaatkan UU dan peraturan sebagai dasar pelaksanaan program/kegiatan organisasi.
13. Maanfatkan SOTK Dinas dalam menanggulangi bencana alam dan bencana sosial sehingga tidak terjadinya Disparatias Sosial Ekonomi Masyarakat
14. Manfaatkan SOTK Dinas untuk mengurangi permasalahan sosial sebagai dampak perkembangan Industrial.
15. Manfaatkan SOTK Dinas untuk memperlancar pola kemitraan agar lebih optimal.
16. Manfaatkan SOTK Dinas untuk melakukan pembinaan terhadap kelompok usaha masyarakat.
17. Gunakan kebijakan daerah yang mendukung pembangunan Pemerintah Desa agar pola kemitraan berjalan dengan optimal.
18. Manfaatkan kebijakan daerah yang mendukung pembangunan masyarakat desa untuk meningkatkan pembinaan terhadap kelompok usaha masyarakat
19. Manfaatkan kebijakan daerah yang mendukung pembangunan pembangunan masyarakat desa untuk mencegah dan meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
20. Maanfatkan tenaga relawan dalam menanggulangi bencana alam dan bencana sosial sehingga tidak terjadinya Disparatias Sosial Ekonomi

3.5.4. Strategi WT Kelemahan (Weakness) Ancaman (Threat)

1. Tingkatkan kualitas SDM Untuk mengoptimalkan pola kemitraan.
2. Tingkatkan kualitas SDM agar pembinaan terhadap kelompok usaha masyarakat meningkat.
3. Tingkatkan kualitas SDM sebagai upaya untuk mencegah dan meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan
4. Tingkatkan peran serta organisasi atau kelembagaan masyarakat untuk meningkatkan pola kemitraan
5. Tingkatkan peran serta organisasi perempuan sehingga kelompok usaha masyarakat dapat berjalan.
6. Manfaatkan peran serta organisasi organisasi atau kelembagaan masyarakat untuk mencegah dan melindungi kesejahteraan keluarga dari tindak kekerasan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pangandaran.

4.1.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dan bersifat idealistik, mengandung keinginan kuat untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik. Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1-5 tahun mengacu visi dan misi serta didasarkan isu dan analisis strategis. Tujuan akan mengarahkan penyusunan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Sedangkan sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Pangandaran adalah

Tujuan dari pelayanan Dinas sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan desa adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2. Meningkatnya cakupan penanganan PPKS
3. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Government)

4.1.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai melalui tindakan berupa kebijakan alokasi sumber daya, program dan kegiatan.

Sebagaimana Visi dan Misi yang telah ditetapkan untuk keberhasilan tersebut, perlu ditetapkan tujuan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran, yang ditempuh melalui penetapan beberapa sasaran yang satu dengan lainnya saling terkait.

1. Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Berkualitas
2. Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
3. Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Baik

Tabel T-C.25.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DINSOSPMD Kabupaten Pangandaran

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
1	2	4	3	6		7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		Indeks Desa Membangun	0.7059	0.7374	0.7689	0.7691	0.7693	0.7696	0.7770	0.7770
		Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang berkualitas	Persentase peningkatan status desa maju dan mandiri	40%	50%	60%	80%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya cakupan penanganan PPKS		Presentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mandiri	27%	30%	37%	47%	57%	67%	77%	77%
		Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Peningkatan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	27%	30%	37%	47%	57%	67%	77%	77%
3	Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Government)		Nilai SAKIP	B	66,90-67,15	67,25-69	69,25-72	72,25-76	76,25-81	81,25-85.00	81,25-85.00
		Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Baik	Nilai LHE AKIP Dinsos PMD	89,37	89,38	89,47	89,57	89,67	89,77	89,87	89,87

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran

Strategi Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran sebagai berikut ;

1. Pembentukan dan pengelolaan desa wisata mandiri (awal dari desa presisi).
2. Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Desa melalui Pembinaan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa.
3. Meningkatkan Kapasitas BUMDES melalui Pembinaan dan Bantuan Modal BUMDES
4. Meningkatkan Kapasitas Pendamping Aparatur Pemerintah dan Kelembagaan melalui Pembinaan Rutin Tiap Bulannya
5. Pemerataan Pembangunan Posyandu di 93 Desa
6. Pelayanan Sosial pada PPKS melalui peningkatan alat bantu dan Peningkatan SPM Sosial serta Peningkatan kualitas dan kemampuan PSKS dalam menangani PPKS.
7. Meningkatkan Pembinaan PPKS oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Pendamping Program Keluarga Harapan
8. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial
9. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Tanggap Darurat Bencana
10. Meningkatkan Pemerataan Penerimaan Kartu Jamkesda atau BPJS Kesehatan
11. Meningkatkan Kapasitas Pegawai melalui Pembinaan oleh Instansi yang Berwenang
12. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perkantoran

5.2 Kebijakan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran, maka strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan. Kebijakan merupakan pedoman dalam melaksanakan kegiatan dan program, mengatur suatu mekanisme tindakan untuk pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran, serta mengimplementasikan keputusan.

Kebijakan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yaitu :

1. Pembinaan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Perencanaan Pembangunan Desa
2. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa
3. Peningkatan Pembinaan Kapasitas BUMDES
4. Peningkatan Kapasitas Pendamping Aparatur Pemerintah dan Kelembagaan
5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Posyandu
6. Pengadaan Alat Bantu, Penanganan SPM serta Peningkatan Pembinaan PSKS

7. Peningkatan Pembinaan PPKS
8. Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Singgah
9. Pemberian Bantuan Sembako dan Alat Bantu Disabilitas Bagi Keluarga Miskin
10. Pembentukan Kampung Siaga Bencana
11. Fasilitasi Pembuatan Kartu Jamkesda atau BPJS Kesehatan
12. Pengusulan, Penambahan dan Penyelenggaraan BIMTEK Pegawai ke BKPSDM
13. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor

Tabel T-C. 26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : **PANGANDARAN JUARA MENUJU WISATA BERKELAS DUNIA YANG BERPIJAK PADA NILAI KARAKTER BANGSA**

MISI PERTAMA : Meningkatkan Kehidupan Masyarakat yang Beriman Taqwa dan Mewujudkan Kerukunan Kehidupan Beragama			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Berkualitas	Pembentukan dan pengelolaan desa wisata mandiri (awal dari desa presisi) Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Desa melalui Pembinaan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa Meningkatkan Kapasitas BUMDES melalui Pembinaan dan Bantuan Modal BUMDES Meningkatkan Kapasitas Pendamping Aparatur Pemerintah dan Kelembagaan melalui Pembinaan Rutin Tiap Bulannya Pemerataan Pembangunan Posyandu di 93 Desa	Pembinaan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Perencanaan Pembangunan Desa Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa Peningkatan Pembinaan Kapasitas BUMDES Peningkatan Kapasitas Pendamping Aparatur Pemerintah dan Kelembagaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Posyandu

MISI KEEMPAT : Meningkatkan Ketahanan Ekonomi dan Sosial yang Berkeadilan Berbasis Potensi Lokal			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya cakupan penanganan PPKS	Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Pelayanan Sosial pada PPKS melalui peningkatan alat bantu dan Peningkatan SPM Sosial serta Peningkatan kualitas dan kemampuan PSKS dalam menangani PPKS. Meningkatkan Pembinaan PPKS oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Pendamping Program Keluarga Harapan Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial Meningkatkan Sarana dan Prasarana Tanggap Darurat Bencana Meningkatkan Pemerataan Penerimaan Kartu Jamkesda atau BPJS Kesehatan	Pengadaan Alat Bantu, Penanganan SPM serta Peningkatan Pembinaan PSKS Peningkatan Pembinaan PPKS Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Singgah Pemberian Bantuan Sembako dan Alat Bantu Disabilitas Bagi Keluarga Miskin Pembentukan Kampung Siaga Bencana Fasilitasi Pembuatan Kartu Jamkesda atau BPJS Kesehatan
MISI KELIMA : Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Melayani Efektif, Efisien dan Akuntabel			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Baik	Meningkatkan Kapasitas Pegawai melalui Pembinaan oleh Instansi yang Berwenang	Pengusulan, Penambahan dan Penyelenggaraan BIMTEK Pegawai ke BKPSDM

(Good Government)		Meningkatkan Sarana dan Prasarana	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
		Perkantoran	

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran dalam upaya pencapaian tujuan dan sasarannya menetapkan beberapa program dan kegiatan. Program dan kegiatan ini sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran sehingga diharapkan memperoleh hasil yang diinginkan.

Program dan Kegiatan yang ada di Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran sebagai berikut :

Tabel T-C 27
Rencana Progam, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Pangandaran

TUJUAN	SASARAN	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah dan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Peran gakat Daerah Penanggung jawab	Lokasi					
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Kinerja 2026								
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Capaian Kinerja	Jumlah Dana/ Pagu Indikatif							
1	2	4	5	6	7	8	9.00	8	9.00	10	11.00	12	13.00	14	15	16	17	18	19	20	21					
			DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				170,565,165,773.00		18,853,925,826.00		19,354,479,936.58		20,530,823,981.93		21,902,600,007.61		23,038,900,438.06		103,680,730,190.18	DINSO SPMD	PANGANDARAN					
			URUSAN SOSIAL				18,771,458,854.00		9,893,208,941.00		10,260,956,206.58		10,946,334,387.93		11,735,169,013.38		12,435,624,750.49		55,271,293,299.38	DINSO SPMD	PANGANDARAN					
Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)				Nilai Sakip	66.73	66,90 - 67,15		67,25 - 69,00		69,25 - 72,00		72,25 - 76,00		76,25 - 81,00		81,25 - 85,00		81,25 - 85,00								
	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Baik				Nilai LHE AKIP Dinsos PMD	89.37 (A)	89,38		89,47		89,57		89,67		89,77		89,87		89,87							
		x	x	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	90	90 %	4,951,990,283.00	91 %	5,190,421,356.00	92 %	5,488,468,575.58	93 %	5,916,176,728.93	94 %	6,399,070,477.48	95 %	6,870,785,027.50	95 %	29,864,922,165.49	DINSO SPMD	PANGANDARAN
									2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %					

TUJUAN	SASARAN	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program/Ke giatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capai an pada Tahun Awal Peren canaa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Peran gakat Dae rah Pena nggun g jawab	Lokasi					
											2021		2022		2023		2024		2025				2026		Kondisi Akhir Kinerja 2026		
											Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Capaian Kinerja	Jumlah Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	4						5	6	7	8	9.00	8	9.00	10	11.00	12	13.00	14	15	16	17	18	19	20	21	
									3. Persentas e peningkatan kompetensi aparatur	NA	90 %		91 %		92 %		93 %		94 %		95 %		95 %				
									4. Persentas e perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100	10 0 %		10 0 %		10 0 %		10 0 %		10 0 %		10 0 %		10 0 %				
		x	x x	0 1	2	0 1		Perencanaan, Penganggar an, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentas e perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	100	10 0 %	46,800,000.0 0	10 0 %	71,480,000.0 0	10 0 %	78,628,000.00	10 0 %	86,490,800.00	10 0 %	95,139,880.00	10 0 %	104,653,868.00	10 0 %	436,392,548.00	DINSO SPMD	PANGA NDARA N	
									2. Persentas e dokumen pengangg aran kinerja yang disusun tepat waktu	100	10 0 %		10 0 %		10 0 %		10 0 %		10 0 %		10 0 %		10 0 %				
									3. Persentas e dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	100	10 0 %		10 0 %		10 0 %		10 0 %		10 0 %		10 0 %		10 0 %				
		x	x x	0 1	2	0 1	0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan aan perangkat daerah yang tersusun	2	2 Doku men	46,800,000.00	2 Doku men	71,480,000.00	2 Doku men	78,628,000.00	2 Doku men	86,490,800.00	2 Doku men	95,139,880.00	2 Doku men	104,653,868.00	14 Doku men	436,392,548.00	DINSO SPMD	PANGA NDARA N	
		x	x x	0 1	2	0 2		Administras i Keuangan Perangkat Daerah	Persentas e unit kerja yang menyusu n laporan kinerja keuangan dengan baik	100	10 0 %	2,647,015,80 6.00	10 0 %	2,647,428,14 3.00	10 0 %	2,912,170,957. 30	10 0 %	3,203,388,053. 03	10 0 %	3,523,726,858 .33	10 0 %	3,876,099,544.1 7	10 0 %	16,162,813,555.8 3	DINSO SPMD	PANGA NDARA N	

TUJUA N	SASAR AN	Kode						Urusan/Bid ang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program/Ke giatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capai an pada Tahun Awal Peren canaa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																Unit Kerja Peran gakat Daera h Pena nggun g jawab	Lokasi
											2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Kinerja 2026					
											Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Capaian Kinerja	Jumlah Dana/ Pagu Indikatif				
1	2	4						5	6	7	8	9.00	8	9.00	10	11.00	12	13.00	14	15	16	17	18	19	20	21		
		x	x	0	2	0	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat fasilitas penyediaan gaji dan tunjangan	15	16 Oran g	2,542,015,806.00	16 Oran g	2,595,948,143.00	16 Oran g	2,855,542,957.30	16 Oran g	3,141,097,253.03	16 Oran g	3,455,206,978.33	16 Oran g	3,800,727,676.17	111 Oran g	15,848,523,007.83	DINSO SPMD	PANGA NDARA N		
		x	x	0	2	0	0	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12 Doku men	105,000,000.00	12 Doku men	51,480,000.00	12 Doku men	56,628,000.00	12 Doku men	62,290,800.00	12 Doku men	68,519,880.00	12 Doku men	75,371,868.00	84 Doku men	314,290,548.00	DINSO SPMD	PANGA NDARA N		
		x	x	0	2	0		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	8	8 Jenis	48,000,000.00	8 Jenis	54,700,000.00	8 Jenis	60,170,000.00	8 Jenis	66,187,000.00	8 Jenis	72,805,700.00	8 Jenis	80,086,270.00	8 Jenis	333,948,970.00	DINSO SPMD	PANGA NDARA N		
										298	298 Unit/ Buah		278 Unit/ Buah		278 Unit/ Buah		278 Unit/ Buah		278 Unit/ Buah		278 Unit/ Buah		278 Unit/ Buah					
		x	x	0	2	0	0	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun	1	1 Doku men	27,000,000.00	1 Doku men	25,000,000.00	1 Doku men	27,500,000.00	1 Doku men	30,250,000.00	1 Doku men	33,275,000.00	1 Doku men	36,602,500.00	7 Doku men	152,627,500.00	DINSO SPMD	PANGA NDARA N		
		x	x	0	2	0	0	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah pada SKPD yang dikelola	8	8 Jenis	21,000,000.00	8 Jenis	29,700,000.00	8 Jenis	32,670,000.00	8 Jenis	35,937,000.00	8 Jenis	39,530,700.00	8 Jenis	43,483,770.00	8 Jenis	181,321,470.00	DINSO SPMD	PANGA NDARA N		
										298	298 Unit/ Buah		278 Unit/ Buah		278 Unit/ Buah		278 Unit/ Buah		278 Unit/ Buah		278 Unit/ Buah		278 Unit/ Buah					
		x	x	0	2	0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	100	100 %	22,920,000.00	100 %	30,212,000.00	100 %	33,233,200.00	100 %	36,556,520.00	100 %	40,212,172.00	100 %	44,233,389.20	100 %	184,447,281.20	DINSO SPMD	PANGA NDARA N		

TUJUA N	SASAR AN	Kode						Urusan/Bid ang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program/Ke giatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capai an pada Tahun Awal Peren canaa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																Unit Kerja Peran gakt Daera h Pena nggun g jawab	Lokasi
											2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Kinerja 2026					
											Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Capaian Kinerja	Jumlah Dana/ Pagu Indikatif				
1	2	4						5	6	7	8	9.00	8	9.00	10	11.00	12	13.00	14	15	16	17	18	19	20	21		
		x	x	0	2	0	0	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah koordinasi pelaksanaan sistem informasi kepegawaian yang dilaksanakan	12	12 Kegiatan	22,920,000.00	12 Kegiatan	30,212,000.00	12 Kegiatan	33,233,200.00	12 Kegiatan	36,556,520.00	12 Kegiatan	40,212,172.00	12 Kegiatan	44,233,389.20	84 Kegiatan	184,447,281.20	DINSO SPMD	PANGANDARAN		
										12	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		84 Laporan					
		x	x	0	2	0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	90	90 %	514,157,597.00	92 %	372,407,000.00	94 %	409,647,700.00	96 %	450,612,470.00	96 %	495,673,717.00	96 %	545,241,088.70	96 %	2,273,581,975.70	DINSO SPMD	PANGANDARAN		
		x	x	0	2	0	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	5	5 Jenis	16,033,905.00	5 Jenis	10,000,000.00	5 Jenis	11,000,000.00	5 Jenis	12,100,000.00	5 Jenis	13,310,000.00	5 Jenis	14,641,000.00	5 Jenis	61,051,000.00	DINSO SPMD	PANGANDARAN		
										34	34 Unit/buah		34 Unit/buah		34 Unit/buah		34 Unit/buah		34 Unit/buah		34 Unit/buah		34 Unit/buah					
		x	x	0	2	0	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor disediakan	32	32 Jenis	53,200,000.00	32 Jenis	141,620,000.00	50 Jenis	155,782,000.00	50 Jenis	171,360,200.00	50 Jenis	188,496,220.00	50 Jenis	207,345,842.00	50 Jenis	864,604,262.00	DINSO SPMD	PANGANDARAN		
										4699	4699 Buah		4699 Buah		8500 Buah		9000 Buah		9500 Buah		10000 Buah		10000 Buah					
		x	x	0	2	0	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor disediakan	17	17 Jenis	25,008,917.00	8 Jenis	12,705,000.00	8 Jenis	13,975,500.00	8 Jenis	15,373,050.00	8 Jenis	16,910,355.00	8 Jenis	18,601,390.50	8 Jenis	77,565,295.50	DINSO SPMD	PANGANDARAN		
										128	128 Buah		60 Buah		70 Buah		80 Buah		90 Buah		90 Buah		90 Buah					

TUJUA N	SASAR AN	Kode						Urusan/Bid ang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program/Ke giatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capai an pada Tahun Awal Peren canaa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																			
											2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Kinerja 2026		Unit Kerja Peran gakat Daera h Pena nggun g jawab	Lokasi				
											Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Capaian Kinerja	Jumlah Dana/ Pagu Indikatif						
1	2	4						5	6	7	8	9.00	8	9.00	10	11.00	12	13.00	14	15	16	17	18	19	20	21				
		x	x	0	2	0	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	3	3 Jenis	35,038,775.00	3 Jenis	15,825,000.00	3 Jenis	17,407,500.00	3 Jenis	19,148,250.00	3 Jenis	21,063,075.00	3 Jenis	23,169,382.50	3 Jenis	96,613,207.50	DINSO SPMD	PANGA NDARA N				
										13233	13233 Buah		7500 Buah		8000 Buah		8500 Buah		9000 Buah		9500 Buah		9500 Buah							
		x	x	0	2	0	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g-undangan yang disediakan	16	16 Jenis	25,200,000.00	20 Jenis	37,720,000.00	20 Jenis	41,492,000.00	20 Jenis	45,641,200.00	20 Jenis	50,205,320.00	20 Jenis	55,225,852.00	20 Jenis	230,284,372.00	DINSO SPMD	PANGA NDARA N				
										48	48 Ekse mplar		60 Ekse mplar		60 Ekse mplar		60 Ekse mplar		60 Ekse mplar		60 Ekse mplar		60 Ekse mplar							
		x	x	0	2	0	0	Penyeleng garan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	158	102 Kegi atan	359,676,000.00	60 Kegi atan	154,537,000.00	80 Kegi atan	169,990,700.00	90 Kegi atan	186,989,770.00	100 Kegi atan	205,688,747.00	100 Kegi atan	226,257,621.70	690 Kegi atan	943,463,838.70	DINSO SPMD	PANGA NDARA N				
										158	102 Lapo ran		60 Lapo ran		80 Lapo ran		90 Lapo ran		100 Lapo ran		100 Lapo ran		690 Lapo ran							
		x	x	0	2	0		Pengadaa n Bara ng Milik Daerah Penun jang Urusan Pemerintah Daerah	Persentas e pengadaa n Bara ng Milik Daerah yang terealisasi	100	100 %	1,190,400,000.00	100 %	1,463,114,213.00	100 %	1,388,430,718.28	100 %	1,406,135,085.90	100 %	1,438,024,670.15	100 %	1,413,634,639.43	100 %	7,109,339,326.76	DINSO SPMD	PANGA NDARA N				
		x	x	0	2	0	0	Pengadaa n Kenda raan Peror angan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	NA	4 Unit	125,000,000.00	4 Unit	158,114,213.00	3 Unit	120,000,000.00	1 Unit	40,000,000.00	1 Unit	44,000,000.00	1 Unit	48,400,000.00	14 Unit	410,514,213.00	DINSO SPMD	PANGA NDARA N				

TUJUAN	SASARAN	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program/Ke giatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Peran gakat Daerah Penanggung jawab	Lokasi				
											2021		2022		2023		2024		2025				2026		Kondisi Akhir Kinerja 2026	
											Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Capaian Kinerja	Jumlah Dana/ Pagu Indikatif
1	2	4						5	6	7	8	9.00	8	9.00	10	11.00	12	13.00	14	15	16	17	18	19	20	21
		x	x	0	2	0	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraa n Dinas Operasion al atau Lapangan yang diadakan	NA	10 Unit	600,400,000.00	18 Unit	840,000,000.00	17 Unit	756,930,718.28	9 Unit	503,485,085.90	8 Unit	345,109,670.15	3 Unit	211,428,139.43	65 Unit	2,656,953,613.76	DINSO SPMD	PANGANDARAN
		x	x	0	2	0	0	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	1	1 Unit	465,000,000.00	1 Unit	465,000,000.00	1 Unit	511,500,000.00	1 Unit	562,650,000.00	1 Unit	618,915,000.00	1 Unit	680,806,500.00	1 Unit	2,838,871,500.00	DINSO SPMD	PANGANDARAN
								Jumlah Gedung Kantor yang dibangun	NA								1 Unit	300,000,000.00	1 Unit	330,000,000.00	1 Unit	363,000,000.00	1 Unit	993,000,000.00	DINSO SPMD	PANGANDARAN
		x	x	0	2	0	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpenuhi	NA								2 Jenis	100,000,000.00	2 Jenis	110,000,000.00	2 Jenis	210,000,000.00	DINSO SPMD	PANGANDARAN	
																		2 Unit		2 Unit		2 Unit				
		x	x	0	2	0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjan g urusan pemerintahan yang disediakan	100	10 %	188,004,920.00	10 %	277,080,000.00	10 %	304,788,000.00	10 %	335,266,800.00	10 %	368,793,480.00	10 %	405,672,828.00	10 %	1,691,601,108.00	DINSO SPMD	PANGANDARAN
		x	x	0	2	0	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang disediakan	1392	13 Buah	12,000,000.00	10 Buah	10,000,000.00	10 Buah	11,000,000.00	10 Buah	12,100,000.00	10 Buah	13,310,000.00	10 Buah	14,641,000.00	7784	61,051,000.00	DINSO SPMD	PANGANDARAN
		x	x	0	2	0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik disediakan	5	5 Rekening	78,604,920.00	5 Rekening	110,000,000.00	5 Rekening	121,000,000.00	5 Rekening	133,100,000.00	5 Rekening	146,410,000.00	5 Rekening	161,051,000.00	5 Rekening	671,561,000.00	DINSO SPMD	PANGANDARAN

TUJUA N	SASAR AN	Kode						Urusan/Bid ang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program/Ke giatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capai an pada Tahun Awal Peren canaa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																			
											2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Kinerja 2026		Unit Kerja Peran gakat Daera h Pena nggun g jawab	Lokasi				
											Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Capaian Kinerja	Jumlah Dana/ Pagu Indikatif						
1	2	4						5	6	7	8	9.00	8	9.00	10	11.00	12	13.00	14	15	16	17	18	19	20	21				
										12	12 Bula n		12 Bula n		12 Bula n		12 Bula n		12 Bula n		12 Bula n		84 Bula n							
		x	x x	0 1	2	0 8	0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediaka n	NA	12 Bula n	97,400,000.00	12 Bula n	157,080,000.0 0	12 Bula n	172,788,000.00	12 Bula n	190,066,800.00	12 Bula n	209,073,480.00	12 Bula n	229,980,828.00	72 Bula n	958,989,108.00	DINSO SPMD	PANGA NDARA N				
										NA	8 Oran g		6 Oran g		6 Oran g		6 Oran g		6 Oran g		6 Oran g		6 Oran g							
										NA	4 Laya nan		4 Laya nan		4 Laya nan		4 Laya nan		4 Laya nan		4 Laya nan		4 Laya nan							
		x	x x	0 1	2	0 9		Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Persentas e prasarana yang baik dan layak fungsi	80	80 %	294,691,960. 00	82 %	274,000,000. 00	84 %	301,400,000.0 0	86 %	331,540,000.0 0	88 %	364,694,000.0 0	90 %	401,163,400.00	90 %	1,672,797,400.00	DINSO SPMD	PANGA NDARA N				
		x	x x	0 1	2	0 9	0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaa n, Biaya Pemeliharaa n dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemelihar aan, Biaya Pemelihar aan dan Pajak Kendaraa n Peroranga n Dinas atau Kendaraa n Dinas Jabatan yang disediaka n	2	2 Unit	63,095,976.00	2 Unit	84,000,000.00	2 Unit	92,400,000.00	2 Unit	101,640,000.00	2 Unit	111,804,000.00	2 Unit	122,984,400.00	2 Unit	512,828,400.00	DINSO SPMD	PANGA NDARA N				

TUJUAN	SASARAN	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah dan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															
											2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Kinerja 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Capaian Kinerja	Jumlah Dana/ Pagu Indikatif		
1	2	4						5	6	7	8	9.00	8	9.00	10	11.00	12	13.00	14	15	16	17	18	19	20	21
		x	x	0	2	0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	13	13 Unit	125,515,984.00	11 Unit	150,000,000.00	11 Unit	165,000,000.00	11 Unit	181,500,000.00	11 Unit	199,650,000.00	11 Unit	219,615,000.00	11 Unit	915,765,000.00	DINSPMD	PANGANDARAN
		x	x	0	2	0	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dikelola	15	15 Unit	15,000,000.00	7 Unit	20,000,000.00	7 Unit	22,000,000.00	7 Unit	24,200,000.00	7 Unit	26,620,000.00	7 Unit	29,282,000.00	7 Unit	122,102,000.00	DINSPMD	PANGANDARAN
		x	x	0	2	0	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang direhabilitasi	1	1 Unit	91,080,000.00	1 Unit	20,000,000.00	1 Unit	22,000,000.00	1 Unit	24,200,000.00	1 Unit	26,620,000.00	1 Unit	29,282,000.00	1 Unit	122,102,000.00	DINSPMD	PANGANDARAN
Meningkatnya kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)							Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mandiri	27%	30 %		37 %		47 %		57 %		67 %		77 %		77 %				
								Persentase Peningkatan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	27%	30 %		37 %		47 %		57 %		67 %		77 %		77 %				

TUJUA N	SASAR AN	Kode						Urusan/Bid ang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program/Ke giatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capai an pada Tahun Awal Peren canaa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Peran gakat Daera h Pena nggun g jawab	Lokasi				
											2021		2022		2023		2024		2025				2026		Kondisi Akhir Kinerja 2026	
											Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Capaian Kinerja	Jumlah Dana/ Pagu Indikatif
1	2	4						5	6	7	8	9.00	8	9.00	10	11.00	12	13.00	14	15	16	17	18	19	20	21
		1	06	02				PROGRAM PEMBERDA YAAN SOSIAL	Presentas e meningka tkan peran lembaga sebagai potensi dan sumber daya dalam penyeleng garan kesejahte raan sosial		50 %	2,692,665,79 1.00	50 %	385,800,000. 00	60 %	394,380,000.0 0	70 %	400,000,000.0 0	75 %	410,000,000.0 0	80 %	421,000,000.00	80 %	2,011,180,000.00	DINSO SPMD	PANGA NDARA N
									Presentas e meningka tkan peran perseoran gan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyeleng garan kesejahte raan sosial		70 %		70 %		80 %		90 %		95 %		100 %	100 %	-	DINSO SPMD	PANGA NDARA N	
		1	06	02	2	03		Pengemban gan Potensi Sumber Kesejahtera an Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peningkat an Kemampu an SDM PSKS	13 Orang	13 Oran g	2,692,665,79 1.00	13 Oran g	385,800,000. 00	13 Oran g	394,380,000.0 0	13 Oran g	400,000,000.0 0	13 Oran g	410,000,000.0 0	13 Oran g	421,000,000.00	13 Oran g	2,011,180,000.00	DINSO SPMD	PANGA NDARA N
									Jumlah partisipas i lembaga dalam penangan an pemerlu pelayanan kesejahte raan sosial (PPKS)	NA	1 Lem baga		1 Lem baga		1 Lem baga		1 Lem baga		1 Lem baga		1 Lem baga		1 Lem baga	-	DINSO SPMD	PANGA NDARA N
		1	06	02	2	03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraa n Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/K ota	Jumlah petugas dan pendampi ng sosial yang dilatih	13 Orang	13 Oran g	791,411,039.0 0	13 Oran g	85,800,000.00	13 Oran g	94,380,000.00	13 Oran g	100,000,000.00	13 Oran g	110,000,000.00	13 Oran g	121,000,000.00	13 Oran g	511,180,000.00	DINSO SPMD	PANGA NDARA N

TUJUA N	SASAR AN	Kode						Urusan/Bid ang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program/Ke giatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capai an pada Tahun Awal Peren canaa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																		Unit Kerja Peran gakat Daera h Pena nggun g jawab	Lokasi			
											2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Kinerja 2026										
											Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Capaian Kinerja	Jumlah Dana/ Pagu Indikatif									
1	2	4						5	6	7	8	9.00	8	9.00	10	11.00	12	13.00	14	15	16	17	18	19	20	21							
		1	06	02	2	03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga PSKS yang dibina	NA	1	Lembaga	1,901,254,752.00	1	Lembaga	300,000,000.00	1	Lembaga	300,000,000.00	1	Lembaga	300,000,000.00	1	Lembaga	300,000,000.00	1	Lembaga	1,500,000,000.00	DINSO SPMD	PANGANDARAN			
		1	06	04				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Presentase PPKS yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	0.2	8	%	3,272,365,085.00	8	%	2,799,427,585.00	8	%	2,278,191,631.00	8	%	2,359,450,059.00	8	%	2,494,720,175.90	8	%	2,542,923,526.99	48.20	%	12,474,712,977.89	DINSO SPMD	PANGANDARAN
		1	06	04	2	01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar yang dibina	NA	2,200	Orang	921,800,000.00	1,040	Orang	503,760,000.00	1,124	Orang	568,195,481.00	1,200	Orang	590,309,069.00	1,200	Orang	649,339,975.90	1,200	Orang	714,273,973.49	7,964	Orang	3,025,878,499.39	DINSO SPMD	PANGANDARAN
		1	06	04	2	01	01	Penyediaan Perumahan	Jumlah Paket Logistik untuk Permasalahan Sosial	350	2,000	Paket	500,000,000.00	840	Paket	210,000,000.00	924	Paket	231,000,000.00	1,000	Paket	254,100,000.00	1,000	Paket	279,510,000.00	1,000	Paket	307,461,000.00	7,114	Paket	1,282,071,000.00	DINSO SPMD	PANGANDARAN
								Jumlah Fakir Miskin yang dibantu		350	2,000	Orang		840	Orang		924	Orang		1,000	Orang		1,000	Orang		1,000	Orang		7,114	Orang	-	DINSO SPMD	PANGANDARAN
		1	06	4	2	01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang terlantar yang ditangani	55	20	Orang	121,800,000.00	20	Orang	22,000,000.00	20	Orang	38,259,481.00	20	Orang	37,273,069.00	20	Orang	41,000,375.90	20	Orang	45,100,413.49	175	Orang	183,633,339.39	DINSO SPMD	PANGANDARAN
		1	06	4	2		06	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis	Jumlah lanjut usia yang ditangani	153	100	Orang	300,000,000.00	100	Orang	271,760,000.00	100	Orang	298,936,000.00	100	Orang	298,936,000.00	100	Orang	328,829,600.00	100	Orang	361,712,560.00	753	Orang	1,560,174,160.00	DINSO SPMD	PANGANDARAN

TUJUAN	SASARAN	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program/Ke giatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capai an pada Tahun Awal Perencanaa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Peran gakat Daera h Penan ggung g jawab	Lokasi						
											2021		2022		2023		2024		2025				2026		Kondisi Akhir Kinerja 2026			
											Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Capaian Kinerja	Jumlah Dana/ Pagu Indikatif				
1	2	4						5	6	7	8	9.00	8	9.00	10	11.00	12	13.00	14	15	16	17	18	19	20	21		
							dan Masyarakat																					
								Jumlah Disabilitas yang dibantu	124	50 Orang		50 Orang		50 Orang		50 Orang		50 Orang		50 Orang		50 Orang		424	Orang	-	DINSO SPMD	PANGANDARAN
								Jumlah anak terlantar yang dibina	377	20 Orang		20 Orang		20 Orang		20 Orang		20 Orang		20 Orang		20 Orang		497	Orang	-	DINSO SPMD	PANGANDARAN
								Jumlah gelandangan pengemis yang dibina	NA	10 Orang		10 Orang		10 Orang		10 Orang		10 Orang		10 Orang		10 Orang		60	Orang	-	DINSO SPMD	PANGANDARAN
		1	06	04	2	02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Rehabilitasi Sosial PPKS yang dibina	NA	150 KK	2,350,565,085.00	150 KK	2,295,667,585.00	150 KK	1,709,996,150.00	150 KK	1,769,140,990.00	150 KK	1,845,380,200.00	150 KK	1,828,649,553.50	900 KK	9,448,834,478.50	DINSO SPMD	PANGANDARAN		
		1	06	04	2	02	02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah KK yang diberi Rutilahu	55	200 KK	100,850,000.00	200 KK	45,952,500.00	200 KK	50,547,750.00	200 KK	50,547,750.00	200 KK	55,602,525.00	200 KK	61,162,777.50	1055 KK	263,813,302.50	DINSO SPMD	PANGANDARAN		
		1	06	04	2	02	14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga dalam kegiatan rehabilitasi sosial	NA	1 Kerja sama	2,249,715,085.00	1 Kerja sama	2,249,715,085.00	1 Kerja sama	1,659,448,400.00	1 Kerja sama	1,718,593,240.00	1 Kerja sama	1,789,777,675.00	1 Kerja sama	1,767,486,776.00	6 Kerja sama	9,185,021,176.00	DINSO SPMD	PANGANDARAN		
		1	06	05				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Presentase Keluarga Miskin yang Meningkatkan Kemampuan dalam mencapai taraf kesejahteraan yang lebih baik	NA	10 %	5,357,370,909.00	10 %	751,560,000.00	10 %	797,916,000.00	10 %	847,707,600.00	10 %	901,278,360.00	10 %	959,006,196.00	60 %	4,257,468,156.00	DINSO SPMD	PANGANDARAN		

TUJUA N	SASAR AN	Kode						Urusan/Bid ang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program/Ke giatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capai an pada Tahun Awal Peren canaa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																		Unit Kerja Peran gakat Daera h Pena nggun g jawab	Lokasi			
											2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Kinerja 2026										
											Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Capaian Kinerja	Jumlah Dana/ Pagu Indikatif									
1	2	4						5	6	7	8	9.00	8	9.00	10	11.00	12	13.00	14	15	16	17	18	19	20	21							
		1	0 6	0 5	2	0 2		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Data Fakir Miskin yang berhak mendapat kan Bantuan	1	1	Doku men	5,357,370,90 9.00	1	Doku men	751,560,000. 00	1	Doku men	797,916,000.0 0	1	Doku men	847,707,600.0 0	1	Doku men	901,278,360.0 0	1	Doku men	959,006,196.00	7	Doku men	4,257,468,156.00	DINSO SPMD	PANGA NDARA N
		1	0 6	0 5	2	0 2	0 1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/K ota	Jumlah PKH yang dibina	62	62	Oran g	2,447,226,928. 00	68	Oran g	408,000,000.0 0	70	Oran g	420,000,000.00	72	Oran g	432,000,000.00	74	Oran g	444,000,000.00	76	Oran g	456,000,000.00	76	Oran g	2,160,000,000.00	DINSO SPMD	PANGA NDARA N
		1	0 6	0 5	2	0 2	0 2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/K ota	Jumlah dokumen data penerima bantuan bpjs kesehatan bagi keluarga miskin	1	1	Doku men	2,910,143,981. 00	1	Doku men	343,560,000.0 0	1	Doku men	377,916,000.00	1	Doku men	415,707,600.00	1	Doku men	457,278,360.00	1	Doku men	503,006,196.00	7	Doku men	2,097,468,156.00	DINSO SPMD	PANGA NDARA N
								Jumlah dokumen data fakir miskin	1	1	Doku men		1	Doku men		1	Doku men		1	Doku men		1	Doku men		1	Doku men		7	Doku men	-	DINSO SPMD	PANGA NDARA N	
		1	0 6	0 6				PROGRAM PENANGAN AN BENCANA	Presentas e Penangan an Korban Bencana yang terpenuhi Kebutuha n Dasarnya sehingga mampu Bertahan Hidup	NA	10 0	%	2,152,047,41 8.00	10 0	%	666,000,000. 00	10 0	%	1,192,000,000. 00	10 0	%	1,302,000,000. 00	10 0	%	1,397,000,000 .00	10 0	%	1,495,500,000.0 0	10 0	%	6,052,500,000.00	DINSO SPMD	PANGA NDARA N
		1	0 6	0 6	2	0 1		Perlindunga n Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	Jumlah perlindun gan sosial korban bencana alam dan sosial yang tertangani	NA				50 0	KK	200,000,000. 00	50 0	KK	300,000,000.0 0	50 0	KK	350,000,000.0 0	50 0	KK	385,000,000.0 0	50 0	KK	423,500,000.00	25 00	KK	1,658,500,000.00	DINSO SPMD	PANGA NDARA N
		1	0 6	0 6	2	0 1		Penyediaan Makanan	Jumlah penyediaa n makanan	NA				50 0	KK	100,000,000.0 0	50 0	KK	150,000,000.00	50 0	KK	175,000,000.00	50 0	KK	192,500,000.00	50 0	KK	211,750,000.00	25 00	KK	829,250,000.00	DINSO SPMD	PANGA NDARA N

TUJUAN	SASARAN	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Peran gakat Daerah Penanggung jawab	Lokasi					
											2021		2022		2023		2024		2025				2026		Kondisi Akhir Kinerja 2026		
											Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Capaian Kinerja	Jumlah Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	4						5	6	7	8	9.00	8	9.00	10	11.00	12	13.00	14	15	16	17	18	19	20	21	
		1	06	06	2	01		Penyediaan Sandang	Jumlah penyediaan sandang	NA			500 KK	100,000,000.00	500 KK	150,000,000.00	500 KK	175,000,000.00	500 KK	192,500,000.00	500 KK	211,750,000.00	2500 KK	829,250,000.00	DINSO SPMD	PANGANDARAN	
		1	06	06	2	02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung Siaga Bencana yang dibentuk serta dibangun	2	2 Desa	2,152,047,418.00	2 Desa	466,000,000.00	2 Desa	892,000,000.00	2 Desa	952,000,000.00	2 Desa	1,012,000,000.00	2 Desa	1,072,000,000.00	14 Desa	4,394,000,000.00	DINSO SPMD	PANGANDARAN	
		1	06	06	2	02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah taruna siaga bencana yang dibangun	55	61 Orang	2,152,047,418.00	61 Orang	466,000,000.00	66 Orang	892,000,000.00	71 Orang	952,000,000.00	76 Orang	1,012,000,000.00	81 Orang	1,072,000,000.00	471 Orang	4,394,000,000.00	DINSO SPMD	PANGANDARAN	
		1	06	07				PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Presentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola	90	10%	345,019,368.00	10%	100,000,000.00	10%	110,000,000.00	10%	121,000,000.00	10%	133,100,000.00	10%	146,410,000.00	10%	610,510,000.00	DINSO SPMD	PANGANDARAN	
		1	06	07	2	01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	1	1 Taman Makam	345,019,368.00	1 Taman Makam	100,000,000.00	1 Taman Makam	110,000,000.00	1 Taman Makam	121,000,000.00	1 Taman Makam	133,100,000.00	1 Taman Makam	146,410,000.00	1 Taman Makam	610,510,000.00	DINSO SPMD	PANGANDARAN	
		1	06	07	2	01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah makam taman pahlawan yang dipelihara	1	1 Taman Makam	345,019,368.00	1 Taman Makam	100,000,000.00	1 Taman Makam	110,000,000.00	1 Taman Makam	121,000,000.00	1 Taman Makam	133,100,000.00	1 Taman Makam	146,410,000.00	1 Taman Makam	610,510,000.00	DINSO SPMD	PANGANDARAN	
		2	13				URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					151,793,706,919.00		8,960,716,885.00		9,093,523,730.00		9,584,489,594.00		10,167,430,994.23		10,603,275,687.57		48,409,436,890.80	DINSO SPMD	PANGANDARAN	
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan								Indeks Desa Membangun	0.7374	0.7251 Indeks		0.7689 Indeks		0.7691 Indeks		0.7693 Indeks		0.7696 Indeks		0.7770 Indeks		0.7770 Indeks					

TUJUAN	SASARAN	Kode						Urusan/Bidang Pemerintah an Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Peran gakat Daerah Penanggung jawab	Lokasi					
											2021		2022		2023		2024		2025				2026		Kondisi Akhir Kinerja 2026		
											Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Capaian Kinerja	Jumlah Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	4						5	6	7	8	9.00	8	9.00	10	11.00	12	13.00	14	15	16	17	18	19	20	21	
Desa	Meningkatkan Urusan pemba ngunan dan pembe rdayaa n masyar akat desa yang berkua litas								Persentas e peningkat an status desa maju dan mandiri	40	50 %		60 %		80 %		100 %		100 %		100 %		100 %				
		2	13	02				Program Penataan Desa	Presentase penataan desa	N/A	50 %	250,000,000.00	50 %	160,000,000.00	55 %	173,000,000.00	60 %	190,300,000.00	65 %	209,330,000.00	70 %	230,263,000.00	70 %	962,893,000.00	DINSO SPMD	PANGANDARAN	
		2	13	02	2	01		Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa yang di tata	N/A	93 Desa	250,000,000.00	93 Desa	160,000,000.00	93 Desa	173,000,000.00	93 Desa	190,300,000.00	93 Desa	209,330,000.00	93 Desa	230,263,000.00	93 Desa	962,893,000.00	DINSO SPMD	PANGANDARAN	
		2	13	02	2	01	02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang di tata wilayahhny a	N/A			20 Desa	50,000,000.00	24 Desa	55,000,000.00	24 Desa	60,500,000.00	25 Desa	66,550,000.00	25 Desa	73,205,000.00	118	305,255,000.00	DINSO SPMD	PANGANDARAN	
		2	13	02	2	01	03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang di tata kewenang annya	N/A	93 Desa	250,000,000.00	20 Desa	30,000,000.00	24 Desa	33,000,000.00	24 Desa	36,300,000.00	25 Desa	39,930,000.00	25 Desa	43,923,000.00	211	183,153,000.00	DINSO SPMD	PANGANDARAN	
		2	13	02	2	01	06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Desa yang terpenuhi sarana dan prasarana nya	N/A			93 Desa	80,000,000.00	93 Desa	85,000,000.00	93 Desa	93,500,000.00	93 Desa	102,850,000.00	93 Desa	113,135,000.00	93	474,485,000.00	DINSO SPMD	PANGANDARAN	
		2	13	03				Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Peningkatan Kerja Sama Desa	N/A	4 %	94,200,000.00	4 %	25,000,000.00	8 %	27,500,000.00	12 %	100,000,000.00	16 %	110,000,000.00	20 %	121,000,000.00	20 %	383,500,000.00	DINSO SPMD	PANGANDARAN	
		2	13	03	2	01		Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Jumlah Fasilitasi Kerjasama Desa	N/A	4 Desa	94,200,000.00	4 Desa	25,000,000.00	4 Desa	27,500,000.00	4 Desa	100,000,000.00	4 Desa	110,000,000.00	4 Desa	121,000,000.00	24	383,500,000.00	DINSO SPMD	PANGANDARAN	
		2	13	03	2	01	01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang difasilitasi kerjasama nya	N/A			4 Desa	25,000,000.00	4 Desa	27,500,000.00	4 Desa	100,000,000.00	4 Desa	110,000,000.00	4 Desa	121,000,000.00	20	383,500,000.00	DINSO SPMD	PANGANDARAN	
							02	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Desa yang difasilitasi kerjasama nya	N/A	93	Desa	94,200,000.00														

TUJUAN	SASARAN	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program/Ke giatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Peran gakat Daerah h Penanggung jawab	Lokasi				
											2021		2022		2023		2024		2025				2026		Kondisi Akhir Kinerja 2026	
											Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Capaian Kinerja	Jumlah Dana/ Pagu Indikatif
1	2	4						5	6	7	8	9.00	8	9.00	10	11.00	12	13.00	14	15	16	17	18	19	20	21
		2	1	0				PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Presentase Administrasi Desa yang baik dan tertib	45	50 %	41,349,916,344.00	50 %	3,255,116,885.00	55 %	3,357,423,730.00	60 %	3,067,089,594.00	65 %	3,571,850,994.23	70 %	3,711,697,687.57	70 %	16,963,178,890.80	DINSO SPMD	PANGANDARAN
		2	1	0	2	0		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang dibangun dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	93	93 Desa	41,349,916,344.00	93 Desa	3,255,116,885.00	93 Desa	3,357,423,730.00	93 Desa	3,067,089,594.00	93 Desa	3,571,850,994.23	93 Desa	3,711,697,687.57	93 Desa	16,963,178,890.80	DINSO SPMD	PANGANDARAN
		2	1	0	2	0	0	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa	93	93 Dokumen		93 Dokumen	82,116,885.00	93 Dokumen	90,328,574.00	93 Dokumen	300,000,000.00	93 Dokumen	150,000,000.00	93 Dokumen	300,000,000.00	651 Dokumen	922,445,459.00	DINSO SPMD	PANGANDARAN
		2	1	0	2	0	0	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah dokumen Penyusunan Perda		1 Perda	200,000,000.00	1 Perda	200,000,000.00	1 Perda	200,000,000.00	1 Perda	200,000,000.00	1 Perda	150,000,000.00	1 Perda	165,000,000.00	5 Perda	915,000,000.00	DINSO SPMD	PANGANDARAN
									Jumlah dokumen Penyusunan Perbup		5 Perbup	100,000,000.00	5 Perbup	100,000,000.00	5 Perbup	135,814,923.00	5 Perbup	149,396,416.23	5 Perbup	164,336,056.57	25 Perbup	649,547,395.80	DINSO SPMD	PANGANDARAN		
		2	1	0	2		0	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Penyusunan Perencanaan Desa yang dibangun	N/A	93 Desa	250,000,000.00	93 Desa	500,000,000.00	93 Desa	500,000,000.00	93 Desa	550,000,000.00	93 Desa	500,000,000.00	93 Desa	550,000,000.00	558 Desa	2,600,000,000.00	DINSO SPMD	PANGANDARAN
		2	1	0	2	0	0	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Evaluasi Keuangan Desa	93	93 Dokumen	70,000,000.00	93 Dokumen	30,000,000.00	93 Dokumen	183,000,000.00	93 Dokumen	300,000,000.00	93 Dokumen	133,802,440.00	93 Dokumen	300,000,000.00	651 Dokumen	796,802,440.00	DINSO SPMD	PANGANDARAN
		2	1	0	2	0	0	Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang dilatih dan dibangun	2155	372 Orang	1,498,962,892.00	186 Orang	250,000,000.00	186 Orang	275,000,000.00	186 Orang	352,500,000.00	186 Orang	200,000,000.00	186 Orang	500,000,000.00	3457 Orang	1,577,500,000.00	DINSO SPMD	PANGANDARAN
		2	1	0	2	0	0	evaluasi dan pengawasan peraturan desa	Jumlah Evaluasi dan pengawasan peraturan desa yang dibangun	NA	93 Desa		93 Desa	100,000,000.00	93 Desa	110,000,000.00	93 Desa	121,000,000.00	93 Desa	133,100,000.00	93 Desa	146,410,000.00	93 Desa	610,510,000.00	DINSO SPMD	PANGANDARAN

TUJUA N	SASAR AN	Kode						Urusan/Bid ang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program/Ke giatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capai an pada Tahun Awal Peren canaa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																		Unit Kerja Peran gakat Daera h Pena nggun g jawab	Lokasi
											2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Kinerja 2026							
											Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Capaian Kinerja	Jumlah Dana/ Pagu Indikatif						
1	2	4						5	6	7	8	9.00	8	9.00	10	11.00	12	13.00	14	15	16	17	18	19	20	21				
		2	1	0	2	0	0	pembinaan dan pemberdaya an BUMDesa dan Lembaga Kerjasama Lainnya	Jumlah BUMDesa yang dibina	13	5 BUM Desa		5 BUM Desa	700,000,000.00	5 BUM Desa	300,000,000.00	5 BUM Desa	330,000,000.00	5 BUM Desa	300,000,000.00	5 BUM Desa	500,000,000.00	43 BUM Desa	2,130,000,000.00	DINSO SPMD	PANGANDARAN				
		2	1	0	2	0	0	Penyelenggaan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah desa yang menyelenggarakan pemilihan kepala desa	NA		17 Desa	800,000,000.00	8 Desa	900,000,000.00		68 Desa	1,000,000,000.00		95 Desa	3,000,000,000.00	DINSO SPMD	PANGANDARAN							
									Jumlah pemberhentian kepala desa yang tertangani	NA		17 Desa	8 Desa				27 Desa	-	DINSO SPMD	PANGANDARAN										
		2	1	0	2	0	1	0	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	NA	20 Orang	50,000,000.00	20 Orang	55,000,000.00	20 Orang	60,500,000.00	20 Orang	66,550,000.00	20 Orang	73,205,000.00	120 Orang	305,255,000.00	DINSO SPMD	PANGANDARAN					
		2	1	0	2	0	1	1	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen data profil desa	93	93 Dokumen	334,317,856.00	93 Dokumen	30,000,000.00	93 Dokumen	1833,000,000.00	93 Dokumen	50,000,000.00	93 Dokumen	55,000,000.00	93 Dokumen	200,000,000.00	651 Dokumen	368,000,000.00	DINSO SPMD	PANGANDARAN			
		2	1	0	2	0	1	2	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Pengelolaan Aset Desa yang dibina	NA	93 Desa	80,000,000.00	93 Desa	88,000,000.00	93 Desa	96,800,000.00	93 Desa	106,480,000.00	93 Desa	117,128,000.00	93 Desa	488,408,000.00	DINSO SPMD	PANGANDARAN					
		2	1	0	2	0	1	3	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah anggota BPD yang dibina	NA	93 Orang	33,000,000.00	93 Orang	36,300,000.00	93 Orang	200,000,000.00	93 Orang	220,000,000.00	93 Orang	242,000,000.00	93 Orang	731,300,000.00	DINSO SPMD	PANGANDARAN					
		2	1	0	2	0	1	8	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa yang sesuai kriteria lomba	10	10 Desa	501,476,784.00	10 Desa	300,000,000.00	10 Desa	336,795,156.00	10 Desa	370,474,671.00	10 Desa	407,522,138.00	10 Desa	453,618,631.00	70 Desa	1,868,410,596.00	DINSO SPMD	PANGANDARAN			
		2	1	0					PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Presentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif	NA	10 %	15,993,790,575.00	10 %	5,520,600,000.00	10 %	5,535,600,000.00	10 %	6,227,100,000.00	10 %	6,276,250,000.00	10 %	6,540,315,000.00	10 %	30,099,865,000.00	DINSO SPMD	PANGANDARAN			

TUJUAN	SASARAN	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Peran gakat Daerah Penanggung jawab	Lokasi								
											2021		2022		2023		2024		2025				2026		Kondisi Akhir Kinerja 2026					
											Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Capaian Kinerja	Jumlah Dana/ Pagu Indikatif				
1	2	4						5	6	7	8	9,00	8	9,00	10	11.00	12	13.00	14	15	16	17	18	19	20	21				
		2	1	0	2	0		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibangun	NA	5	Lembaga	15,993,790,575.00	5	Lembaga	5,520,600,000.00	5	Lembaga	5,535,600,000.00	5	Lembaga	6,227,100,000.00	5	Lembaga	6,276,250,000.00	5	Lembaga	30,099,865,000.00	DINSO SPMD	PANGANDARAN
		2	1	0	2	0	0	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah lembaga yang dibangun	1 Lembaga	5	Lembaga	11,913,909,964	5	Lembaga	4,020,600,000.00	5	Lembaga	4,020,600,000.00	5	Lembaga	4,485,600,000.00	5	Lembaga	4,485,600,000.00	5	Lembaga	21,498,000,000.00	DINSO SPMD	PANGANDARAN
		2	1	0	2	0	0	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah kelompok usaha ekonomi masyarakat yang dibangun	NA	10	Kelompok	100,000,000.00	10	Kelompok	100,000,000.00	10	Kelompok	100,000,000.00	10	Kelompok	110,000,000.00	10	Kelompok	121,000,000.00	60	Kelompok	531,000,000.00	DINSO SPMD	PANGANDARAN

TUJUAN	SASARAN	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															
											2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Kinerja 2026		Unit Kerja Peran gakat Daerah h Penanggung jawab	Lokasi
											Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Capaian Kinerja	Jumlah Dana/ Pagu Indikatif		
1	2	4						5	6	7	8	9.00	8	9.00	10	11.00	12	13.00	14	15	16	17	18	19	20	21
		2	1	0	2	0	0	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah TTG yang mengikuti lomba	1	1 TTG		1 TTG	150,000,000.00	1 TTG	165,000,000.00	1 TTG	181,500,000.00	1 TTG	199,650,000.00	1 TTG	219,615,000.00	7 TTG	915,765,000.00	DINSO SPMD	PANGANDARAN
		2	1	0	2		0	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah kegiatan yang terdampangi	NA	3 Kegiatan	3,130,880,611.00	3 Kegiatan	250,000,000.00	3 Kegiatan	150,000,000.00	3 Kegiatan	250,000,000.00	3 Kegiatan	250,000,000.00	3 Kegiatan	250,000,000.00	3 Kegiatan	1,050,000,000.00	DINSO SPMD	PANGANDARAN
		2	1	0	2	0	0	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah anggota PKK yang dibina	300	30 Orang	750,000,000.00	30 Orang	1,000,000,000.00	30 Orang	1,100,000,000.00	30 Orang	1,210,000,000.00	30 Orang	1,331,000,000.00	30 Orang	1,464,100,000.00	30 Orang	6,105,100,000.00	DINSO SPMD	PANGANDARAN

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada Bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Pangandaran yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Pangandaran dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pangandaran 2021 – 2026.

Indikator kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Pangandaran Kabupaten Pangandaran yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel 6.1 sebagai berikut ;

Tabel T-C.28
Indikator Kinerja DINSOSPMD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja awal periode RPJMD	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	4	5	6	7
1	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah		90%	91%	92%	93%	94%	94%
2	Presentase meningkatnya peran lembaga sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial		50%	60%	70%	75%	80%	80%
3	Presentase meningkatnya peran perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial		70%	80%	90%	95%	100%	100%
4	Presentase PPKS yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	0.2%	8%	8%	8%	8%	8%	40.2%
5	Presentase Keluarga Miskin yang Meningkatkan Kemampuannya dalam mencapai taraf kesejahteraan yang lebih baik		10%	10%	10%	10%	10%	50%
6	Presentase Penanganan Korban Bencana yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya sehingga mampu Bertahan Hidup		100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Presentase Taman Makam Makam Pahlawan yang di Kelola	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	Indikator	Kondisi Kinerja awaal periode RPJMD	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	4	5	6	7
8	Presentase penataan desa yang dibina		50%	55%	60%	65%	70%	70%
9	Persentase Peningkatan Kerja Sama Desa		4%	8%	12%	16%	20%	20%
10	Presentase Administrasi Desa yang baik dan tertib	45%	50%	55%	60%	65%	70%	70%
11	Presentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif		100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII PENUTUP

Untuk keberhasilan mewujudkan visi, misi, target dan sasaran yang direncanakan dalam renstra diperlukan tekad, semangat dan tanggungjawab yang tinggi dari seluruh staf Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Sehubungan dengan itu mottodan nilai yangberkaitandengan sikap dan perilaku etos kerja dalam menjalankan tugasagar dihayati dan dilaksanakan dengansebaik-baiknya.

Monitoring dan evaluasi kinerja yang hasilnya menjadi bahan laporan akuntabilitas kinerja perlu dilakukan secara lebih cermat dan akurat. Dari hasil evaluasi tersebut akandapat direncanakan langkah-langkah yang tepat, untuk memperbaiki kelemahan yang ada dan mengembangkan hasil-hasil kegiatan yang sudah dapat diimplementasikan secara berkesinambungan.

Semoga renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrument perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

Parigi, 23 September 2021

**KEPALA
DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN MASYATAKAT DAN DESA
KABUPATEN PANGANDARAN**



H. WAWAN KUSTAMAN, S.Pd.,MM
NIP. 19670722 199307 1 001